



**MODEL PEMBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI
KONSTRUKSI MODAL SOSIAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN
MANDIGU KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

TESIS

**MAHMUD RIZAL, SE.
NIM. 160820201006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**MODEL PEMBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI KONSTRUKSI
MODAL SOSIAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN MANDIGU
KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Ekonomi (S2) serta mencapai
gelar Magister Sains

**MAHMUD RIZAL, SE.
NIM. 160820201006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta yang teriring dalam ungkapan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW, saya persembahkan tesis ini kepada :

1. Istri Tercinta Elfina Novianti, SE yang mendukung penuh atas selesainya rangkaian study hingga tugas akhir ini
2. Anak anak tercinta Lia, Rere dan Bhisma yang menjadi energi sekaligus menjadi pelipur lara disaat penat
3. Saudara saudara dan keponakan seluruh keluarga besar Bapak Sudjono (alm) dan Ibu Hadiyah (alm)
4. Kawan Kawans seperjuangan di MIE FEB Universitas Jember khususnya angkatan 2016
5. Lembagaku Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Ekonomi dan Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.
6. Dewan guru yang terhormat sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketabahan

MOTTO

*“Sekali Melangkah Pantang Menyerah, Sekali Maju Pantang Mundur, Sekali Tampil
Harus Berhasil”**



* Majalah Commando, Volume VI Nomor 1 Tahun 2010, Hlm. 57.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahmud Rizal, SE.

NIM : 160820201006

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (tesis) yang berjudul **MODEL PEMBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI KONSTRUKSI MODAL SOSIAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN MANDIGU KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 November 2020

Yang menyatakan,

materai
Rp. 6.000

Mahmud Rizal, SE.
NIM. 160820201006

TESIS

**MODEL PEMBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI
KONSTRUKSI MODAL SOSIAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN
MANDIGU KECAMATAN MUMBULSARI
KABUPATEN JEMBER**

**MAHMUD RIZAL, SE.
NIM. 160820201006**

Pembimbing :

Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Mohammad Saleh, SE., M.Sc.
Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Zainuri, M.Si.

PENGESAHAN

Tesis berjudul **MODEL PEMBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI KONSTRUKSI MODAL SOSIAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN MANDIGU KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER** karya Mahmud Rizal,

SE., telah diuji dan disahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 3 November 2020

Tempat : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Tim Penguji :

Penguji Utama

Penguji Anggota I

Penguji Anggota II

Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si.
NIP. 19581024 198803 1 001

Dr. Agus Luthfi, M.Si.
NIP. 19650522 199002 1 001

Dr. Moh. Adenan, MM.
NIP. 19661031 199203 1 001

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Prof. Dr. Mohammad Saleh, SE., M.Sc.
NIP. 19560831 198403 1 002

Dr. Zainuri, M.Si.
NIP. 19640325 198902 1 001

Mengesahkan,

Dekan,

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

RINGKASAN

Model Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Konstruksi Modal Sosial Di Kawasan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember:

Mahmud Rizal, 160820201006; 2020: halaman; Jurusan Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember. Penelitian ini yang dilakukan di kawasan hutan pegunungan Mandigu desa Suco dan Lampeji kecamatan Mumbulsari kabupaten Jember bertujuan untuk (1) Mendiskripsikan bagaimana upaya pengembangan modal sosial di kawasan hutan Mandigu tersebut; dan (2) menggambarkan dampak modal sosial terhadap masyarakat desa hutan khususnya petani kopi di kawasan hutan pegunungan Mandigu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan utama (dominan kualitatif). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi terlibat, dan studi dokumenter. Hasil penelitian menunjukkan (1) pengembangan modal sosial pemberdayaan petani kopi melalui : (a) media olahraga paralayang di kawasan pegunungan mandigu menjadi komunitas setempat dan mengkader atlet-atlet paralayang lokal setempat; (b) pemilihan tokoh informal yang sangat paradok yakni mantan tokoh preman hutan kawasan pegunungan Mandigu sebagai pemimpin komunitas; (c) membangun keteladanan yang mempunyai komitmen pada nilai –nilai etika, bisa dipercaya; jujur; pola pikir memberi; saling mendukung, (d) pengembangan budidaya pisang, jeruk lemon secara masal untuk mengamankan pendapatan harian/mingguan (*safety first*) dan (e) pengembangan jaringan hulu hilir komoditas kopi yang berkualitas dan dipercaya dengan branding “Cadjoeng” dengan Standart Operasional Pelaksanaan (SOP) yang ketat. (2) Dampak pengembangan modal sosial terhadap pengelolaan hutan kawasan pegunungan mandigu antara lain (a) kesejahteraan pertama yakni pendapatan mingguan dan bulanan terjaga (*safety first*); (b) hutan dikelola secara berkelanjutan dilihat dari aspek lingkungan alam; sosial; dan budaya local; serta aman dari pencurian kayu; (c) berkembangnya budidaya kopi hulu –hilir yang berkualitas dengan perubahan teknologi panen dan paska panen; (d) Terbangunnya agroekosistem hutan yang lestari; (e) jaringan tataniga kopi hulu-hilir dengan branding “Cadjoeng Copy” yang semakin berkembang; (f) Berkembangnya komunitas internasional aktivitas Paralayang yang melokal di kawasan Mandigu dengan multiplier efek yang besar bagi kesejahteraan petani.

Kata Kunci : Modal Sosial, Pemberdayaan, Kopi

SUMMARY

Model Empowerment Of Coffee Farmers Through Social Capital Construction In The Mandigu Mountain Area Mumbulsari Subdistrict Jember District; Mahmud Rizal, 160820201006; 2020: pages; Master of Economics Department, Faculty of Economics and Business, Jember University.

This research, which was conducted in the mountainous forest area of Mandigu, Suco and Lampeji villages, Mumbulsari sub-district, Jember district, aims to (1) describe how the social capital development efforts in the Mandigu forest area are; and (2) describe the impact of social capital on forest village communities, especially coffee farmers in the Mandigu mountain forest area. This study uses a qualitative approach as the main approach (predominantly qualitative). Data were collected through in-depth interviews, involved observation, and documentary studies. The results showed (1) the development of social capital empowerment of coffee farmers through: (a) paragliding media in the Mandigu mountain area to become a local community and cadre of local local service athletes; (b) the election of an informal figure who is very paradoxical, namely a former figure of forest thugs in the Mandigu mountain area as the leader of the community; (c) build role models that are committed to ethical values, can be trusted; honest; the mindset of giving; mutual support, (d) mass development of banana and lemon cultivation to secure daily / weekly income (safety first) and (e) development of quality and trusted upstream and downstream coffee commodity networks with branding "Cadjoeng" with Standard Operational Implementation (SOP) tight. (2) The impact of the development of social capital on forest management in the Pegungan Mandigu area, among others (a) welfare first, namely sustained weekly and monthly income (safety first); (b) forests are managed in a sustainable manner from the aspect of the natural environment; social; and local culture; and safe from timber theft; (c) the development of quality upstream-downstream coffee cultivation with changes in harvest and post-harvest technology; (d) Development of sustainable forest agroecosystems; (e) a growing network of upstream-downstream triple coffee arrangements with the branding "Cadjoeng Copy"; (f) The development of an international community of paragliding activities that is localized in the Mandigu area with a large multiplier effect on the welfare of farmers.

Keyword : Social Capital, Empowerment, Coffee

PRAKATA

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya ke seluruh alam semesta, atas izin dan petunjuk-Nya karya tulis ilmiah (tesis) berjudul **MODEL PEMBERDAYAAN PETANI KOPI MELALUI KONSTRUKSI MODAL SOSIAL DI KAWASAN PEGUNUNGAN MANDIGU KECAMATAN MUMBULSARI KABUPATEN JEMBER** dapat terselesaikan. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda besar Muhammad SAW beserta para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister Ilmu Ekonomi (S2) dan mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., selaku Rektor Universitas Jember;
2. dr. Hj. Faida, MMR., selaku Bupati Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk melanjutkan studi stara dua ini;
3. Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember beserta para Pembantu Dekan yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;

4. Dr. Siti Komariyah, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember;
5. Prof. Dr. Mohammad Saleh, SE., M.Sc., dan Dr. Zainuri, M.Si., selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, dan kepercayaan dalam penyelesaian tulisan ini;
6. Dr. Rafael Purtomo Somaji, M.Si., Dr. Agus Luthfi, M.Si., dan Dr. Moh. Adenan, MM., selaku tim penguji dalam ujian tesis telah memberikan saran dan kritik membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
7. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen yang telah memberi bekal ilmunya serta seluruh Civitas Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
8. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2016 Program Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, *tiada gading yang tak retak*. Besar harapan penulis, segenap pembaca berkenan memberikan kritik dan saran terhadap tesis ini agar dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi makmur sejahtera.

Jember, 3 November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

<i>Cover</i> depan	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persembahan	iii
Halaman <i>Motto</i>	iv
Halaman Pernyataan	v
Halaman Pembimbingan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Ringkasan	viii
Halaman Summary	ix
Halaman Prakata	x
Halaman Daftar Isi	xii
Halaman Daftar Tabel	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Konsepsi Modal Sosial	9

2.1.2 Teori Modal Sosial	11
2.1.3 Teori Membangun Modal Sosial	27
2.1.3.1 Menciptakan (dan Menghancurkan) Modal Sosial	27
2.1.3.2 Prasyarat Membangun Modal Sosial	28
2.1.4 Teori Pemberdayaan	41
2.1.5 Teori Ekonomi Kelembagaan	45
2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya	48
2.3 Kerangka Konseptual	64
BAB III Metodologi Penelitian	65
3.1 Rancangan Penelitian	65
3.2 Lokasi Penelitian	65
3.3 Penentuan Informan	67
3.4 Pengumpulan Data	67
3.5 Analisa Data	69
3.6 Validitas Data	69
3.7 Kesimpulan	69
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	71
4.1 Gambaran Umum	71
4.1.1 Sejarah Pengelolaan Hutan Mandigu	74
4.2 Analisis Data	78
4.2.1 Upaya Pengembangan Modal Sosial	78

4.2.1.1 Komunitas Paralayang Sebagai Awal Kontruksi	
Modal Sosial	78
4.2.1.2 Penguatan Nilai-Nilai Lokal Sebagai Bagian	
Modal Sosial	95
4.2.2 Dampak Pengembangan Modal Sosial	110
4.2.2.1 Peningkatan Kesejahteraan Dalam Bentuk Pendapatan	
Mingguan Dan Bulanan Terjaga (<i>Safety First</i>)	110
4.2.2.2 Hutan Dikelola Secara Berkelanjutan Serta Aman	
Dari Pencurian Kayu	111
4.2.2.3 Berkembangnya Budidaya Kopi Hulu-Hilir Yang	
Berkualitas Dengan Perubahan Teknologi Panen	
Dan Paska Panen	111
4.2.2.4 Terbangunnya Jaringan Tata Niaga Kopi Hulu-Hilir	
Dengan Branding Cadjoeng Coffee	112
4.3 Pembahasan	113
BAB V Penutup	118
5.1 Kesimpulan	118
5.2 Saran	119
Daftar Pustaka	121
Lampiran-Lampiran	125

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sintesis Qakley	30
Tabel 4.1 Tata Guna Lahan di Desa Suco dan Lampeji (Ha)	72
Tabel 4.2 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Desa Suco dan Lampeji	73
Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Berdasarkan pekerjaan Utama di Desa Suco dan Lampeji	73
Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Berdasarkan Pendidikan di Desa Suco dan Lampeji	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai bagian dari kawasan *equator state* menjadinya daerah makmur *gemah ripah loh jinawi*. Berbagai literatur menunjukkan bahwa negara kawasan *equator state* sudah ditakdirkan menjadi negara ter subur yang tentunya menjadi nilai *plus* untuk menarik perhatian negara lain. Sejarah mencatat mulai abad 16 terjadi kolonisasi, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam maupun sumber daya manusia di Indonesia sejak Portugis (1509-1602) datang dibawah *Alfonso de Albuquerque* dilanjutkan Belanda (1602-1942), Inggris (1811-1816), Jepang (1942-1945) dan diakhiri dengan pendudukan Belanda melalui Agresi Militer II (1945-1949).

Pasca kemerdekaan 1945, pemerintah masih tetap dan terus berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana amanah *founding fathers* yang tertuang pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 melalui berbagai program-program pemerintah baik yang dilakukan oleh pemerintah secara langsung maupun bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* lainnya. Namun tidak sedikit program-program yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat itu tepat sasaran bahkan hasil yang diharapkan banyak tidak sesuai dengan yang diimpikan/diinginkan dari adanya program tersebut. Salah satu contohnya berawal dari Tahun 2010 saat saya menjalankan tugas sebagai Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten

Jember untuk memetakan kawasan rawan bencana di wilayah Mumbulsari menemukan sebuah pengalaman pahit di wilayah Kawasan Gugusan Pegunungan Mandigu yang terletak di Desa Lampeji dan Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember (selanjutnya penulis sebut kawasan lingkaran mandigu) dimana ada seorang warga meninggal dunia namun keluarganya kesulitan untuk mendapatkan kain kafan serta biaya/keperluan lainnya sehingga saya dan rekan-rekan yang sedang bertugas tergerak untuk membantu warga yang kesulitan tersebut.

Kejadian itu merupakan salah satu contoh realitas yang dihadapi masyarakat Indonesia khususnya kawasan lingkaran mandigu. Ditambah lagi segi geografis kawasan lingkaran mandigu seluas 1500 Ha berkarakter tebing dengan kemiringan landai sampai curam tergantung dari sifat fisik bebatuan dan tanah pembentuk lereng, vegetasi penutup jarang dan berada pada potensi curah hujan tinggi sehingga merupakan salah satu kawasan berpotensi terhadap ancaman bencana tanah longsor. Berbagai realitas fakta sosial ekonomi serta dampak negatif lainnya bermunculan sebagai akibat dari struktur demografi, geografis ataupun keadaan sosial kemasyarakatan dalam memenuhi sandang, pangan dan pangan dalam dinamika kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.. Kondisi tersebut berlangsung lama berkisar sejak tahun 1997 hingga sekarang misalnya :

- a. Sering terjadinya konflik horizontal baik antar masyarakat disekitar wilayah hutan produksi dan hutan lindung tersebut, maupun masyarakat dengan petugas perhutani RPH Mumbulsari yang mengelola hutan dimaksud;

- b. Banyaknya buruh migran baik luar maupun dalam negeri sebagai dampak taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah;
- c. Dengan rendahnya kesejahteraan menyebabkan banyaknya angka kriminalitas misalnya seperti *illegal logging* dan *illegal minning* serta tak jarang pula terjadi bentrokan fisik antara masyarakat dengan petugas/lembaga hukum;
- d. Munculnya kawasan rawan bencana dilingkar mandigu akibat ekses dalam pemenuhan kebutuhan sandang, papan, pangan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berbagai program pemerintah melalui perhutani maupun pemerintah kabupaten yang bekerjasama dengan TNI/Polri ataupun *stakeholders* lainnya belum bisa memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan secara geografis sumber daya alam berupa hutan yang mengelilingi kawasan penduduk seharusnya menjadi potensi besar sebagai sumberdaya yang dapat menyejahterakan masyarakat dikawasan hutan tersebut, kondisi tersebut di atas menjadi ide dasar penelitian ini, untuk mengungkapkan apa yang menjadi persoalan sehingga sinergitas sesama masyarakat, dan masyarakat dengan perhutani yang notabene mempunyai keahlian untuk mengelola hutan tidak dapat menyejahterakan masyarakat sekitar hutan melalui Lemabaga Masyarakat Desa Hutan dengan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) misalnya model sinergitas tertentu seharusnya dapat menjadi solusi bagi keharmonisan hubungan masyarakat, perhutani dan alam untuk kesejahteraan bersama.

Sebagaimana pendapat Mubarak (2010) yang menyatakan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.

Oleh sebab itu beberapa kegiatan yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah setempat tidak berjalan sebagai mana diharapkan misalnya dalam kegiatan reboisasi oleh Pemerintah Daerah Jember yang bekerjasama dengan Perum Perhutani KPH Jember dengan membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) untuk menjaga konservasi hutan melalui reboisasi mengingat kawasan mandigu secara administratif merupakan kawasan hutan produksi dibawah Perum Perhutani KPH Jember namun tidak berjalan maksimal sesuai yang diharapkan karena masyarakat hanya dijadikan alat sementara untuk menyukseskan program reboisasi tersebut tanpa ada tindakan lainnya secara berkelanjutan dan berkesinambungan untuk membantu kehidupan masyarakat lingkaran mandigu agar lebih sejahtera setelah program tersebut terlaksana.

Praktek kelola hutan oleh masyarakat atau sering diistilahkan dengan pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) masih menjadi perdebatan ilmiah terkait dengan kapasitas masyarakat dan jaminan kelestarian hutan. Berbagai penelitian tentang PHBM mengidentifikasi kesenjangan teori dan praktek yang menyebabkan penilaian berbeda terhadap kinerja PHBM. Beberapa peneliti kemudian menyarankan kajian sosiologi dan antropologi untuk memperkuat kajian-kajian terdahulu tentang PHBM. Konsep modal sosial merupakan konsep yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja PHBM karena konsep ini dinilai mampu menjelaskan fenomena sosio-ekonomis dan sosio-ekologis secara menyeluruh.

Beberapa kajian membuktikan bahwa keberhasilan PHBM tersebut terbangun oleh adanya keterkaitan modal sosial yang kuat. Aturan-aturan pengelolaan lokal, kepercayaan, dan jaringan dalam proses pembangunan hutan kemiri sesuai dengan konsep inti modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (1993, 2000), Coleman (1988), dan Fukuyama (1995, 1999, 2001). Dilihat secara teori struktur modal sosial pembangunan hutan rakyat kawasan Mandigu secara swadaya di Kabupaten Jember saat ini diduga sangat kuat pada level mikro (Uphoff, 1999), yaitu adanya jaringan kerjasama horizontal antar individu dan atau antar kelompok keluarga (*appang*) berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dianut bersama. Sedangkan modal sosial pada level makro (kebijakan dalam pengelolaan hutan) tidak banyak berperan pada awal pembangunan hutan rakyat kawasan Mandigu tersebut. Kebijakan TGHK sebagai modal sosial level makro dalam pembangunan hutan rakyat, diharapkan dapat memberi lingkungan normatif dan memperkuat modal sosial pada level mikro, namun

pada kenyataannya, justru merusak sistem pengelolaan yang ada. Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah ketidak harmonisan pola interaksi dan keterkaitan modal sosial dalam pengelolaan hutan rakyat di kawasan Mandigu Kabupaten Jember.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis ingin mengkaji lebih komprehensif tidak sinergisnya hubungan masyarakat dengan berbagai program pemerintah baik melalui Perhutani maupun Pemerintah Kabupaten Jember pasca reformasi 1997 sehingga proses pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan tidak berjalan sebagaimana diharapkan ke dalam sebuah karya tulis ilmiah (tesis) berjudul Pemberdayaan Petani Kopi Melalui Pengembangan Modal Sosial Di Kawasan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah untuk dibahas dan dikaji secara komprehensif melalui tugas akhir ini yaitu Penerapan Konstruksi Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Petani Kopi) Di Kawasan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan upaya pengembangan modal sosial di Kawasan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember
2. Menjelaskan dampak pengembangan modal sosial terhadap masyarakat desa hutan khususnya petani kopi di Kawasan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan proses penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah :

1. Manfaat bagi penulis :
 - a. Mengetahui kendala-kendala dan menemukan solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat kawasan lingkaran mandigu;
 - b. Memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi potensi ancaman bencana tanah longsor di kawasan lingkaran mandigu;
2. Manfaat Bagi Pemerintah/Instansi terkait :
 - a. Membantu lembaga/instansi memahami keinginan dan kebutuhan masyarakat kawasan lingkaran mandigu dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui adanya program-program yang berkelanjutan serta memiliki dampak positif dua arah baik bagi masyarakat maupun pemerintah/instansi;

- b. Membantu lembaga/instansi terkait untuk mengedukasi masyarakat disekitar kawasan lingkaran mandiri khususnya dalam pengelolaan hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) agar mengeksplorasi segenap potensi yang ada sehingga dapat dikelola secara positif untuk kesejahteraan bersama, meminimalisir terjadinya *illegal logging* maupun *illegal minning* serta menjaga hutan tetap lestari untuk mengahiri ancaman bencana alam.
3. Manfaat Bagi Masyarakat :
- a. Masyarakat dapat bersinergi dan mensukseskan program-program pemerintah/instansi terkait untuk mengelola segenap potensi di kawasan lingkaran mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bersama;
 - b. Masyarakat dapat terhindar dari ancaman bencana alam yang dapat ditimbulkan dalam kawasan lingkaran mandiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsepsi Modal Sosial

Penulis merangkum konsepsi modal sosial dari beberapa pakar/ahli sebagai berikut :

1. Lyda Judson Hanifan (1916)

Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk **kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga** yang membentuk suatu kelompok sosial.

2. Pierre Bourdieu (1986)

Bourdieu mendefinisikan **modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui.**

3. James Coleman 1988

Struktur kewajiban (*obligations*), ekspektasi, dan kepercayaan, tergantung dari dua elemen kunci yaitu kepercayaan dari lingkungan social dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (*obligation held*).

Jaringan informasi (*information channels*), Informasi sangatlah penting sebagai basis tindakan, tetapi harus disadari bahwa informasi itu mahal dan tidak gratis. **Norma serta sanksi yang efektif** (*norms and effective sanctions*).

4. Robert Putnam (1993)

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai gambaran kelembagaan sosial, seperti jaringan, norma, dan kepercayaan sosial, yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama yang saling menguntungkan.

5. Francis Fukuyama (1995)

Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Jaringan hubungan, norma-norma sosial, kepercayaan dan kemauan untuk saling berbalas kebaikan (*resiprositas*) guna meningkatkan kualitas kehidupan.

6. Hobbs (2000)

Hobbs menyatakan modal sosial sebagai fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma (etika timbal balik), dan jaringan (keterlibatan sipil), yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Secara luas disepakati bahwa fasilitas modal sosial yang saling menguntungkan adalah aksi kolektif.

7. Bank Dunia

Bank Dunia menyatakan modal sosial sebagai aturan, norma, kewajiban, dan kepercayaan yang tertanam dalam hubungan sosial, struktur sosial, serta pengaturan kelembagaan masyarakat yang memungkinkan anggota untuk mencapai tujuan individu dan komunitas.

2.1.2 Teori Modal Sosial

Penulis merangkum tentang teori modal sosial dari beberapa pakar/ahli sebagai berikut :

1. Lyda Judson Hanifan (1916)

Istilah *social capital* sudah diperkenalkan Lyda Judson Hanifan dalam sebuah tulisan tentang keberhasilan seorang kepala sekolah membangun rasa kebersamaan dalam sebuah komunitas masyarakat, sehingga kemajuan tidak hanya dicapai oleh anak didik tetapi juga oleh warga masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam tulisan tersebut Hanifan bukan hanya sekedar memperkenalkan istilah dan memberi definisi terhadap istilah

tersebut tetapi juga jelas menunjukkan suatu pemikiran yang konseptual tentang strategi pengembangan modal sosial dalam masyarakat. Pendekatan terhadap masalah yang ditunjukkannya memang kelihatan lebih bersifat praktis dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh kalangan pembaca pada umumnya.

Ide konsep Hanifan tentang modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Pemikiran seperti inilah yang pada awal abad ke 20 mengilhami seorang pendidik di Amerika Serikat bernama Lyda Judson Hanifan untuk memperkenalkan konsep modal sosial pertama kalinya. Dalam tulisannya berjudul *'The Rural School Community Centre'* (Hanifan, 1916:130).

Hanifan mengatakan modal sosial bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan atau uang, tetapi lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Menurut Hanifan, dalam modal sosial termasuk **kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat antara individu dan keluarga** yang membentuk suatu kelompok sosial.

Zat berwujud yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari orang: yaitu niat baik, persekutuan, simpati, dan pergaulan antar individu dan keluarga yang membentuk sebuah komunitas. Individu tidak berdaya secara sosial, jika dibiarkan sendiri. Jika dia melakukan kontak dengan tetangganya, dan mereka dengan tetangga lain, akan ada akumulasi modal sosial, yang mana dapat segera memenuhi kebutuhan sosialnya dan yang mungkin memiliki potensi sosial yang cukup untuk perbaikan substansial dari kondisi kehidupan di seluruh komunitas. Komunitas secara keseluruhan akan mendapatkan keuntungan dengan kerjasama dari semua bagiannya, sementara individu akan menemukan dalam asosiasinya keuntungan dari bantuan, simpati, dan persekutuan dengan tetangganya.

2. Pierre Bourdieu (1986)

Sekalipun Hanifan telah menggunakan istilah modal sosial hamper seabad yang lalu, istilah tersebut baru mulai dikenal di dunia akademis sejak akhir tahun 1980an. Pierre Bourdieu, seorang sosiolog Perancis kenamaan, dalam sebuah tulisan yang berjudul "*The Forms of Capital*" (1986) mengemukakan bahwa untuk dapat memahami struktur dan cara berfungsinya dunia sosial perlu dibahas modal dalam segala bentuknya, tidak cukup hanya membahas modal seperti yang dikenal dalam teori ekonomi. Penting juga diketahui bentuk-bentuk transaksi yang dalam teori ekonomi dianggap sebagai non-ekonomi karena tidak dapat secara langsung memaksimalkan keuntungan material. Padahal sebenarnya dalam setiap

transaksi modal ekonomi selalu disertai oleh modal immaterial berbentuk modal budaya dan modal sosial. Bourdieu menjelaskan perbedaan antara modal ekonomi, modal budaya dan modal sosial, dan menggambarkan bagaimana ketiganya dapat dibedakan antara satu sama lain dilihat dari tingkat kemudahannya untuk dikonversikan. Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan.

Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaan. Sekalipun diperoleh melalui perguruan tinggi yang sama dan dalam jangka waktu pendidikan yang sama, masing-masing gelar kesarjanaan dengan bidang keahlian yang berbeda memiliki “nilai jual ekonomi” yang berbeda. Bahkan gelar kesarjanaan dalam bidang sama tetapi diperoleh dari perguruan tinggi yang berbeda akan mengandung nilai ekonomi yang berbeda. Seorang tamatan perguruan tinggi yang memiliki nilai akreditasi tinggi pada umumnya akan lebih mudah mendapat pekerjaan dengan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan seorang tamatan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang rendah nilai akreditasinya.

Pemikiran Bourdieu, karena sebelumnya disampaikan dalam bahasa Perancis dan lebih bersifat gagasan filosofis dan teoritis, hanya terbatas dikenal di kalangan akademisi, tidak menjangkau kalangan pembaca yang lebih luas. Oleh karena itu konsep modal sosial yang digagasnya tetapi tinggal sebagai bahan wacana di dunia perguruan tinggi. Bertolak dari pola pikir tersebut maka Bourdieu mendefinisikan **modal sosial sebagai** keseluruhan sumberdaya baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui.

Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya (Bourdieu, 1986: 249).

3. James Coleman (1988)

Fukuyama (1995). Melalui tulisan-tulisan mereka konsep modal sosial mulai mendapat perhatian besar dari berbagai kalangan. Baik sebagai sebuah pendekatan teoritis yang baru untuk memahami dinamika suatu masyarakat maupun sebagai alat yang efektif untuk membantu percepatan perbaikan

kondisi ekonomi, terutama pada masyarakat di negara-negara berkembang. Sementara Pierre Bourdieu lebih menekankan pada pemahaman teoritik James Coleman menuangkan gagasan pemikiran tentang modal sosial berdasarkan hasil-hasil penelitian (Coleman 1988, 1990) dan disusul kemudian oleh tulisan-tulisan Robert Putnam (1983, 1985) dan Francis.

Coleman dalam sebuah tulisan yang berjudul “*Social Capital in the Creation of Human Capital*” (1988) memperkenalkan modal sosial sebagai sarana konseptual untuk memahami orientasi teoritis tindakan sosial dengan mengaitkan komponen-komponen dari perspektif sosiologi dan ekonomi. Dengan cara demikian ia menggunakan prinsip-prinsip dalam ilmu ekonomi untuk menganalisis proses sosial. Coleman membahas bagaimana modal sosial terbentuk dan menyoroiti modal sosial dalam tiga bentuk yang berbeda. Dengan menggunakan data yang berasal dari sebuah penelitian mengenai siswa di sebuah sekolah menengah, ia menggambarkan bagaimana modal sosial (*social capital*) berperan dalam menciptakan modal manusia (*human capital*) dengan cara memperlihatkan apa yang berlangsung dalam keluarga dan masyarakat dalam proses perkembangan pendidikan anak-anak. Sebuah contoh yang jelas dalam hal ini adalah bagaimana pentingnya keterlibatan orang tua murid dan para guru dalam wadah POMG untuk bersama-sama membahas langkah langkah terbaik guna meningkatkan kemajuan anak didik.

Coleman berpendapat bahwa pengertian modal sosial ditentukan oleh fungsinya. Sekalipun sebenarnya terdapat banyak fungsi modal sosial tetapi ia mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki dua unsur yang sama, yakni: (1) modal sosial mencakup sejumlah aspek dari struktur sosial, dan (2) modal sosial memberi kemudahan bagi orang untuk melakukan sesuatu dalam kerangka struktur sosial tersebut. Ia memberi penekanan terhadap dua aspek dari struktur sosial yang sangat penting dalam memudahkan tercipta dan berkembangnya modal sosial dalam berbagai bentuk:

1. Aspek dari struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial yang membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi anggota jaringan itu;
2. Adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya Coleman mengidentifikasi tiga unsur utama yang merupakan pilar modal social yaitu:

1. Kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial. Ia mengambil contoh sistem arisan yang populer dalam masyarakat di banyak negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Sistem arisan yang dilakukan oleh sekelompok orang

yang memiliki hubungan pertemanan, tetangga atau kekerabatan merupakan sebuah contoh yang jelas tentang bagaimana pentingnya arti kepercayaan;

2. Modal sosial menurut Coleman adalah pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat. Arus informasi yang tidak lancar cenderung menyebabkan orang menjadi tidak tahu atau ragu-ragu sehingga tidak berani melakukan sesuatu;
3. Norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif. Tanpa adanya seperangkat norma yang disepakati dan dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat maka yang muncul adalah keadaan anomali dimana setiap orang cenderung berbuat menurut kemauan sendiri tanpa merasa ada ikatan dengan orang lain. Juga tidak ada mekanisme untuk menjatuhkan sanksi karena tidak ada norma yang disepakati bersama berkaitan dengan sanksi tersebut. Dengan demikian pengembangan modal sosial pada dasarnya ditujukan untuk membangun ketiga pilar yang dimaksudkan Coleman itu.

Coleman lebih mengembangkan lagi pemikirannya tentang modal sosial melalui sebuah karya besarnya yang terbit dua tahun kemudian dengan judul *Foundations of Social Theory* (Coleman, 1990). Dalam bukunya itu Coleman mengatakan antara lain bahwa modal sosial, seperti halnya modal ekonomi,

juga bersifat produktif. Tanpa adanya modal sosial seseorang tidak akan bisa memperoleh keuntungan material dan mencapai keberhasilan lainnya secara optimal. Sebagaimana modal-modal lainnya, seperti modal fisik dan modal manusia, modal sosial tidak selalu memberi manfaat dalam segala situasi, tetapi hanya terasa manfaatnya dalam situasi tertentu. Suatu bentuk modal sosial bisa bermanfaat untuk memudahkan seseorang melakukan tindakan dalam suatu situasi, tetapi dalam situasi lain tidak ada gunanya dan bahkan bisa menimbulkan kerugian.

Untuk memahami pemikiran Coleman tersebut dapat diberikan contoh sebagai berikut. Seseorang yang memiliki modal sosial berupa hubungan baik dengan seorang pejabat atau penguasa bisa memperoleh keuntungan berupa materi atau perlindungan dari pejabat atau penguasa itu. Tetapi apabila kemudian situasi berubah modal sosial semacam itu justru bisa berbalik merugikannya. Orang-orang yang berseberangan paham politik dengan pejabat itu pasti tidak akan memberikan kesempatan padanya untuk mendapat keuntungan dalam bentuk apapun, bahkan dalam situasi tertentu bisa mencelakakannya. Paling tidak akan dikucilkan dan tidak akan mendapat kepercayaan di dalam jaringan hubungan lain yang para anggotanya tidak menyenangi pejabat tersebut. Dalam literatur yang muncul belakangan (Portes, 1997) sisi modal sosial yang mengandung ciri eksklusivisme disebut *downside social capital*. Pemikiran Coleman dalam dua karyanya tersebut menjadi titik

tolak bagi para pakar lain untuk menjelaskan pentingnya peranan modal sosial dalam berbagai aspek kehidupan.

4. Robert Putnam (1993)

Robert Putnam yang paling berhasil mempopulerkan konsep modal sosial kepada berbagai kalangan pembaca, baik di dunia akademis, para praktisi sosial, media massa, maupun kalangan pembaca pada umumnya. Dalam bukunya *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy* (1993: 36) Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai *'features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate coordination and co-operation for mutual benefit,'* ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Definisi ini paling mudah dipahami kalangan masyarakat luas dibandingkan dengan definisi Bourdieu maupun Coleman yang lebih berbobot akademis. Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang. Maksudnya modal sosial terdiri dari *"networks of civic engagements"* jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep model sosial, yakni adanya jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitiannya yang dilaporkan dalam buku tersebut Putnam menyimpulkan modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Ada tiga alasan penting bagi Putnam untuk mengatakan demikian :

1. Adanya jaringan sosial memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat;
2. Kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu;
3. Berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya dalam jaringan ini akan mendorong bagi keberlangsungan kerjasama pada waktu selanjutnya.

Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial bahkan dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat. Kebenaran pendapat Putnam yang terakhir ini antara lain didukung oleh sebuah fakta empirik tentang bagaimana pemerintah di Polandia berhasil

menghimpun para pakar dan pengusaha tanpa memandang ideologi untuk membangun negara pada masa pasca komunisme. Sebagaimana dikemukakan Sztompka (1999), berbeda dengan negara-negara Eropa Timur lain yang melakukan “dekomunikasi” atau pembersihan pemerintahan dari unsur-unsur pengikut paham komunisme, pemerintah Polandia justru menunjukkan kemauan politik yang baik dan melupakan pertentangan ideologi masa lampau. Seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan pemikiran dan material tanpa memandang ideologi diajak dan diberi kepercayaan untuk bersama-sama membangun negara.

Dengan dikesampingkannya perbedaan ideologi maka pemerintah dan masyarakat Polandia lebih berpeluang untuk berkonsentrasi dalam membangun ekonomi. Kasus Polandia ini memperlihatkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan dan jaringan hubungan antara pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat merupakan salah satu kunci utama bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan ekonomi.

5. Francis Fukuyama (1995)

Pentingnya kepercayaan dalam mencapai kesejahteraan ekonomi merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Dalam karyanya *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity* (1995) Fukuyama, seorang pakar sosiologi Amerika keturunan Jepang kelahiran Chicago yang terkenal ini, mengatakan kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara

sesama warga. Bertolak dari karya pakar modal sosial sebelumnya, terutama James Coleman, Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkat modal sosial. Ia berpendapat modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama yang berkaitan dengan etika dan moral yang berlaku. Karena itu ia berkesimpulan bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan.

Berdasarkan penelitiannya di beberapa negara di Asia, seperti Cina dan Jepang, Fukuyama menemukan bahwa untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi-organisasi ekonomi berskala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, menurut pendapatnya, kelembagaan itu baru dapat berfungsi secara baik apabila terdapat cukup perhatian terhadap pentingnya peranan kebiasaan-kebiasaan dalam budaya tradisional. Peraturan, kontrak, dan rasionalitas ekonomi semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan adanya nilai-nilai resiprositas, tanggungjawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan daripada perhitungan rasional.

Selanjutnya masih dalam bukunya tersebut Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga

masyarakat. Kelangsungan hidup organisasi dan kelembagaan besar ekonomi juga ditentukan oleh masyarakat sipil (*civil society*) yang sehat dan dinamis, yang pada gilirannya tergantung pula pada adat kebiasaan dan etika, sebagai hal-hal yang hanya bisa terbentuk secara tidak langsung dengan adanya kemauan untuk itu, serta adanya kesadaran yang semakin besar dan penghargaan terhadap budaya.

Bertitik tolak pada keyakinan bahwa nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara bersangkutan, akhirnya Fukuyama sampai pada pembedaan bangsa-bangsa dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah (*low-trust society*) dalam nilai budayanya. Masyarakat seperti ini sulit untuk dapat mengembangkan usaha-usaha yang berskala besar karena dalam nilai budayanya tingkat kepercayaan terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Di luar lingkungan keluarga itu kepercayaan sulit ditumbuhkan. Fukuyama menyebut Cina, Perancis dan Korea sebagai contoh-contoh masyarakat yang memiliki nilai budaya kepercayaan rendah.

Sebaliknya, bangsa-bangsa telah lebih dahulu berhasil menjadi kekuatan ekonomi besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman, menurut Fukuyama, adalah berkat masyarakatnya memiliki nilai budaya kepercayaan yang tinggi (*high trust society*). Tetapi tesis Fukuyama tentang keterkaitan antara nilai budaya tradisional dengan tingkat kepercayaan ini barangkali hanya

merupakan salah satu faktor saja dalam menjelaskan perkembangan dan kemajuan ekonomi yang dialami suatu bangsa.

Faktor-faktor lainnya, seperti adanya kemauan politik yang juga disinggung Fukuyama, tingkat pendidikan dan pengalaman kosmopolitan yang membawa pergeseran nilai budaya di kalangan generasi yang lebih muda, bisa juga menjadi faktor pendorong perkembangan ekonomi pada bangsa-bangsa tertentu. Cina, khususnya Taiwan, dan Korea Selatan, yang dikategorikan Fukuyama sebagai bangsabangsa yang memiliki nilai budaya kepercayaan rendah atau *low-trust society*, ternyata juga berhasil menjadi kekuatan ekonomi besar, dengan produk-produk di bidang elektronika, komputer dan otomotif yang turut merajai pasaran dunia. Mungkin sekali keinginan untuk terus menerus mencapai hasil terbaik (*need for achievement, n-Ach*) sebagai faktor pendorong kemajuan ekonomi seperti yang dikemukakan McClelland (1961) dapat digunakan untuk menjelaskan kemajuan ekonomi spektakuler yang dicapai Taiwan sejak dua dekade belakangan ini.

Sementara itu, kemauan politik dan tekad pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, seperti yang ditunjukkan oleh Presiden Park Chung-Hee dari Korea Selatan melalui program *Saemaul Undong* atau Gerakan Komunitas Baru (*Saemaul Undong in Korea, 1983*) merupakan salah satu faktor penentu lainnya. Kerajinan, kemandirian dan kerjasama (*dilligent, self-help and cooperation*) sebagai tiga prinsip dasar yang didorong untuk ditumbuhkan dalam masyarakat melalui Gerakan tersebut sejak awal tahun

1970an, telah memberi kontribusi penting bagi bangkitnya Korea Selatan sebagai kekuatan ekonomi dunia.

James Coleman, Robert Putnam dan Francis Fukuyama merupakan tokoh-tokoh yang pemikirannya telah mendorong para pakar lainnya untuk melakukan pengkajian mengenai peranan modal sosial dalam berbagai bidang, seperti politik dan pemerintahan, pelayanan umum, transaksi ekonomi, pendidikan, kesehatan, rekrutment tenaga kerja, pertanian, pengelolaan sumber air, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya. Kajian-kajian yang telah dilakukan kemudian dijadikan sebagai titik tolak dalam mengembangkan berbagai unsur pokok modal sosial, seperti jaringan hubungan, norma-norma sosial, kepercayaan dan kemauan untuk saling berbalas kebaikan (resiprositas) guna meningkatkan kualitas dari bidang-bidang tersebut.

Para pakar yang muncul belakangan melalui berbagai tulisannya berusaha menetapkan lebih lanjut kerangka konseptual bagaimana bentuk operasionalisasi modal sosial dengan menetapkan berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kondisi modal sosial pada suatu kelompok masyarakat. Dengan adanya alat pengukur ini maka kemudian dapat dilakukan langkah-langkah intervensi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas modal pada kelompok masyarakat tersebut.

2.1.3 Teori Membangun Modal Sosial

“... Ciri-ciri organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma (atau timbal balik), dan jaringan (keterlibatan sipil), yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat memfasilitasi tindakan terkoordinasi. ”

Banyak definisi mendefinisikan apa itu modal sosial dan apa fungsinya. Nyatanya, sepertinya ada menjadi kesepakatan yang lebih luas dalam literatur tentang apa yang dilakukan modal sosial, daripada apa itu modal sosial. Secara khusus, telah disepakati secara luas bahwa fasilitas modal sosial saling menguntungkan aksi kolektif. Modal sosial dapat menghasilkan keluaran positif atau negatif. Misalnya Olson (1982) berpendapat bahwa kelompok mungkin bersedia untuk membebaskan biaya pada non-anggota untuk mencapai tujuan mereka. Sebaliknya, Putnam et al, (1993) berpendapat bahwa kerjasama antar anggota dari suatu kelompok menciptakan kebiasaan dan sikap untuk melayani kebaikan yang lebih besar yang terbawa untuk interaksi anggota dengan non-anggota.

2.1.3.1 Menciptakan (dan Menghancurkan) Modal Sosial

Jika modal sosial bermanfaat, apakah mungkin untuk menciptakan lebih banyak? Sama halnya, bisa modal sosial dihancurkan? Apakah agen eksternal memiliki peran dalam menciptakan modal sosial?

Putnam (1993) berpendapat bahwa modal sosial di Italia merupakan warisan dari periode yang lama perkembangan sejarah, dan oleh karena itu tidak dapat ditambahkan dalam jangka pendek. Ini prognosis ditantang oleh sejumlah studi empiris terbaru (Schneider et al, 1997). Misalnya, telah ditunjukkan bahwa mengubah

struktur dan komposisi dewan sekolah dapat meningkatkan secara signifikan tingkat keterlibatan orang tua dalam kegiatan terkait sekolah dan pada gilirannya membantu membangun modal sosial. Yang lain hadir serupa kesimpulan tentang desain proyek irigasi (Ostrom, 1994 dan Lam, 1996).

Banyak orang berpendapat bahwa menciptakan modal sosial adalah mungkin, meskipun prosesnya bertahap. Lebih jauh, mereka berpendapat bahwa modal sosial bisa terkikis lebih cepat dan lebih mudah daripada yang dapat dibuat. Falk dan Kilpatrick (1999) berpendapat bahwa akumulasi modal sosial adalah hasil dari proses interaksi pembelajaran. Interaksi pembelajaran membutuhkan a peristiwa pembelajaran (peristiwa aktual) dan terjadi dalam dimensi kontekstual (luas, Kerangka acuan sosial budaya dan politik).

2.1.3.2 Prasyarat Untuk Membangun Sosial

Modal adalah adanya interaksi pembelajaran yang cukup dan berkualitas. Untuk Contoh Falk dan Kilpatrick menyarankan bahwa interaksi pembelajaran yang berkualitas mencakup konteks sejarah, interaksi eksternal, timbal balik, kepercayaan, norma dan nilai bersama. Perencanaan dan pelaksanaan proyek komunitas dapat menjadi salah satu pembelajaran seperti itu interaksi. Uphoff (1999) membedakan antara modal sosial struktural dan kognitif. Struktural modal sosial melibatkan berbagai bentuk organisasi sosial, termasuk peran, aturan, preseden dan prosedur serta berbagai jaringan yang berkontribusi pada kerjasama. Modal sosial kognitif meliputi norma, nilai, sikap dan kepercayaan.

Modal sosial struktural dan kognitif saling melengkapi: struktur membantu menerjemahkan norma dan keyakinan ke dalam perilaku berorientasi tujuan yang terkoordinasi dengan baik. Penulis lain (Sabel, 1994) berpendapat bahwa modal sosial dibangun sebagai hasil dari semua actor berkomitmen untuk negosiasi yang sedang berlangsung berdasarkan pemahaman bersama tentang tujuan bersama. Hechter (1987) menyarankan proses multistage untuk membangun grup solidaritas. Setelah bergabung bersama anggota harus menyusun aturan dan prosedur, yang mana dilembagakan seiring waktu. Internalising aturan dan prosedur, anggota moderat perilaku mereka sehingga sesuai dengan harapan orang lain. Ini membangun modal sosial - aturan formal dan harapan bersama - memfasilitasi perluasan kegiatan kelompok ke dalam area yang belum dijelajahi sebelumnya

Beberapa praktisi berpendapat bahwa partisipasi masyarakat jarang terjadi secara spontan, melainkan melibatkan persiapan sosial (Albee & Boyd, 1997). Ini adalah sebuah proses mendukung orang untuk : (a) Kumpulkan informasi tentang keadaan dan sumber daya mereka; (b) Analisis situasinya; (c) Memprioritaskan tindakan yang ingin mereka lakukan; (d) Bergabung bersama ke dalam kelompok atau organisasi pilihan mereka sendiri; dan (e) Cari cara untuk mengimplementasikan tindakan ini.

Persiapan sosial semacam itu membutuhkan pola sistematis aksi-refleksi-aksi, dan merupakan praktik inti mendasar dari pembangunan partisipatif (Albee & Boyd, 1997). Melakukan Intervensi untuk Memperkuat Modal Sosial - Kelompok swadaya Jenis intervensi apa yang paling berhasil digunakan untuk mempromosikan

partisipasi? Sebuah sintesis oleh Oakley et al (1991) mengusulkan enam berikut ini ukuran.

Tabel 2.1 Sintesis Oakley

Animasi	Membantu masyarakat lokal merangsang kesadaran kritis mereka sendiri, untuk memeriksa dan menjelaskan masalah dengan kata-kata mereka sendiri, dan menyadari apa yang dapat mereka lakukan untuk menghasilkan perubahan.
Penataan	Pengembangan kohesi internal dan solidaritas antar orang, dan beberapa bentuk organisasi terstruktur
Fasilitasi	Peran layanan yang membantu orang untuk melakukan secara spesifik tindakan; tindakan ini termasuk memperoleh tertentu keterampilan teknis dan manajerial, mendapatkan akses ke yang tersedia sumber daya atau menerjemahkan ide mereka sendiri ke dalam proyek yang layak.
Perantara	Untuk berfungsi sebagai perantara dalam kaitannya dengan layanan eksternal lainnya. Untuk menjalin kontak dengan layanan yang ada dan memperkenalkan orang dengan prosedur dan mekanisme untuk menangani ini jasa.
Menghubungkan	Untuk membantu mengembangkan hubungan antara orang-orang dalam konteks yang serupa dan menghadapi masalah serupa.
Penarikan (Withdrawal)	Redundansi progresif dari intervensi eksternal.

Berpartisipasi dalam suatu kelompok membutuhkan biaya yang mahal bagi anggota dalam hal waktu dan tenaga, dan sumber daya. Tinjauan literatur Munkner (1979) tentang kelompok swadaya menemukan pengenalan kelompok tanpa penilaian sebelumnya tentang permintaan lokal asli untuk ini kelompok adalah kesalahan kebijakan yang umum. Evaluasi Kabubila (1994) untuk Desa GTZ Program di dua distrik jika Tanga (Tanzania), menyatakan bahwa banyak anggota kelompok melakukannya tidak tahu mengapa pendekatan kelompok akan membantu mereka. Uphoff (1999) mengatakan bahwa file Strateginya, dalam sistem irigasi Gal Oya di Sri Lanka, adalah bekerja dulu, mengorganisir kemudian untuk menunjukkan manfaat

yang dapat dicapai melalui aksi kolektif. Ini menciptakan permintaan untuk organisasi lokal, daripada memulai dengan membuat pasokan organisasi yang tidak dirasakan kebutuhannya dengan jelas.

Beberapa orang berpendapat bahwa agen eksternal tidak boleh membuat grup. Salah satu opsinya adalah untuk agen eksternal untuk mendukung hanya kelompok dengan sejarah tertentu. Dalam praktiknya, mungkin saja sulit untuk mendukung kelompok tanpa, setidaknya secara tidak langsung membuat mereka. Namun, sekadar pengumuman bahwa donor atau LSM akan memberikan dukungan untuk pertemuan kelompok kriteria tertentu mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok ini. Perbedaan antara dukungan dan kreasi (mobilisasi animasi) mungkin agar program-program pendukung mencapai tujuan dengan baik berpengetahuan dan terhubung (orang tidak miskin) sedangkan mobilisasi mungkin mampu menjangkau mereka yang terpinggirkan dan rentan. Salah satu motivasi pembentukan kelompok desa di Tanzania hari ini adalah akses yang diberikan untuk dukungan donor.

Penelitian di Tanzania menemukan bahwa wanita yang paling miskin dan terpinggirkan berada kurang terwakili dalam organisasi wanita di satu desa di Gunung Kilimanjaro (Mercer, 1999). Dapat dikatakan bahwa penggunaan metode partisipatif tidak menjamin masuknya kelompok rentan. Hume (2000) berpendapat bahwa praktik terbaik -pertemuan terbuka dan umum, pemilihan rutin, pelatihan keuangan untuk para pemimpin, inklusi perempuan tidak serta merta menghentikan penangkapan elit organisasi lokal atau penciptaan elit baru. Dia berpendapat bahwa analisis pemangku kepentingan adalah salah satu cara untuk mengeksplorasi masalah

seperti itu. Modal sosial dipengaruhi oleh dan mempengaruhi struktur kekuasaan sosial. Kemampuan untuk membuat atau menghancurkan modal sosial akan tergantung pada bagaimana struktur kekuasaan dan tradisionalnya norma asosiasi diterapkan oleh staf lapangan dari lembaga eksternal. Divisi sosial harus diakui secara terbuka, dinegosiasikan secara aktif, dan diwakili jika perlu dimasukkannya individu yang sampai sekarang dikecualikan.

Struktur sosial dan kekuasaan juga muncul secara eksternal. Grup dibuat sebagai pelaksana pengembangan masyarakat dapat dianggap terutama sebagai bagian dari beberapa eksternal sistem atau proyek lembaga pengembangan. Terkait dengan ini adalah kekhawatiran tentang penambangan modal sosial: menggunakan stok modal sosial yang ada untuk mencapai tujuan (eksternal) lain dan, dalam prosesnya, menghabiskan stok awal.

Secara umum, tidak ada satu model untuk pembentukan modal sosial atau penciptaan atau penguatan kelompok lokal. Albee & Boyd (1997) berpendapat bahwa tidak ada satu pun jawaban atau model untuk mempromosikan partisipasi... hanya ada kerangka kerja dan prinsip panduan. Pantoja (1999) berpendapat bahwa bukan salah satu model lokal tertentu organisasi, berbagai macam organisasi masyarakat harus dipromosikan. Sana perlu pendekatan partisipatif individu untuk setiap intervensi.

a) Manfaat Modal Sosial

Pembentukan modal sosial yang termasuk dalam aspek kelembagaan telah diyakini sebagai solusi untuk masalah-masalah yang kerap timbul,

diantaranya masalah sosial seperti kemiskinan, kejahatan dan pemerintahan yang tidak efisien (Acemoglu dan Robinson, 2014). Teori evolusi pemikiran pembangunan bahwa modal sosial merupakan cara untuk menghilangkan kemiskinan. Pada generasi pertama tahun 1950-1975 teori-teori pembangunan ekonomi itu berfokus pada empat isu sentral yaitu: (1) pertumbuhan, (2) akumulasi kapital, (3) transformasi struktural dan (4) peran pemerintah (Meier & Joseph Stiglitz, 2002).

Secara teoretis, pembangunan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ditandai oleh peningkatan pendapatan perkapita seperti tercermin pada GDP. Namun, pertumbuhan mensyaratkan adanya akumulasi kapital yang hanya bisa dicapai melalui investasi. Salah satu strategi untuk memacu akumulasi kapital dan mendorong investasi adalah industrialisasi. Paradigma pembangunan yang dirumuskan oleh generasi pertama ini menuai kritik tajam, sebab pembangunan telah menciptakan ketimpangan dan kesenjangan yang mencolok antar kelompok masyarakat dan membelenggu kebebasan manusia. Para ekonom menyatakan makna paling hakiki pembangunan itu bukan semata peningkatan pendapatan perkapita, melainkan pemerataan distribusi pendapatan, penurunan pengangguran, pembebasan kemiskinan, dan penghapusan ketidakadilan. Salah satu cara pembebasan kemiskinan adalah dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang dimana erat kaitannya antara konsep modal sosial dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Modal sosial dapat diterapkan untuk

berbagai kebutuhan, namun yang paling banyak adalah untuk upaya pemberdayaan masyarakat. World Bank memberi perhatian yang tinggi dalam mengkaji peranan dan implementasi modal sosial khususnya untuk pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang (Syahyuti, 2008).

World Bank dalam Mardikanto dan Soebianto (2013) bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memberi kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu menyuarkan pendapat dalam memilih sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll.) Harizi dalam Mardikanto dan Soebianto (2013) menyatakan perubahan-perubahan itu hanya akan terwujud jika dilaksanakan oleh individu-individu atau sekelompok orang yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan tertentu yang diandalkan, dan seringkali juga memerlukan kelembagaan tertentu.

Menurut Lin dalam Yustika (2013) modal sosial dapat meningkatkan efektivitas pembangunan melalui :

- (1) Tersedianya aliran informasi. Dalam pasar yang tidak sempurna ikatan sosial dalam posisi lokasi/hierarki yang strategis dapat menyediakan individu dengan informasi yang berguna tentang kesempatan dan pilihan-pilihan. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki posisi yang strategis, dipastikan tidak memiliki keuntungan tersebut. Dengan informasi yang sudah didapat berarti

individu tersebut bisa mengurangi biaya transaksi untuk melakukan kegiatan ekonomi;

(2) Ikatan sosial (*social ties*) bisa memengaruhi pelaku (*agents*), misalnya supervisor organisasi, yang memiliki peran penting (*crucial role*) dalam pengambilan keputusan (seperti penggajian atau promosi). Terbangunnya pengaruh yang semakin kuat antar pelaku pembangunan dalam pengambilan keputusan;

(3) Ikatan sosial mungkin diberikan oleh organisasi atau pelakunya sebagai sertifikasi kepercayaan sosial individu (*individual's social credentials*), yakni sesuatu yang merefleksikan aksesibilitas individu terhadap sumber daya lewat jaringan dan relasi yang dimiliki;

(4) Hubungan sosial diharapkan dapat memperkuat kembali identitas dan pengakuan (*recognition*). Penguatan kembali (*reinforcements*) tersebut sangat esensial bagi pemeliharaan kesehatan mental dan pembagian sumber daya (*entitlement to resources*). Jadi, keempat elemen tersebut, informasi, pengaruh, kepercayaan sosial dan penguatan kembali mungkin bisa menjelaskan mengapa modal sosial bekerja dalam tindakan-tindakan instrumental dan ekspresif yang tidak dapat dihitung dalam bentuk modal personal (*personal capital*), seperti modal ekonomi atau modal manusia.

Paldam (2000) menyatakan bahwa adanya modal sosial akan menentukan bagaimana mudahnya orang-orang bekerja bersama sehingga menurunkan biaya transaksi, memungkinkan pengembangan kontrak informal yang tidak melibatkan pihak ketiga, memuluskan aksi kolektif dan mengurangi pembonceng (*free rider*), terutama dalam berbagai kontrak dan penyediaan barang bersama.

b) Hubungan Modal Sosial dengan Modal Kapital dan Modal Fisik

Secara tradisional, modal fisik, modal manusia dan modal alam merupakan input yang menentukan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Namun tidak dapat dilupakan bahwa pandangan tersebut mengabaikan cara di mana para pelaku ekonomi berinteraksi dan mengorganisir diri untuk menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan. Suatu rantai yang mereka lupakan adalah modal sosial (Grootaert 1997). Menurut Grootaert dan Thiery van Bastellaer (2001) bahwa Modal sosial memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan modal fisik dan modal alam, tetapi karakteristiknya sama dengan modal manusia.

Modal sosial dapat mengakumulasi seluruh input untuk menghasilkan sebuah output yang maksimal. Output dari modal sosial itu sendiri adalah sebuah aksi kerjasama. Ilmuwan, ahli sosiologi, dan antropologi cenderung mendekati konsep modal sosial melalui analisis norma, jaringan, dan organisasi. Ekonom, di sisi lain, cenderung mendekati konsep melalui

analisis kontrak dan lembaga, serta dampaknya terhadap insentif bagi pelaku rasional untuk terlibat dalam investasi dan transaksi.

c) Perspektif Modal Sosial Dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Woolcock dan Narayan (2000) ada empat perspektif modal sosial dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

1. Pandangan Komunitarian

Pandangan komunitarian mempersamakan modal sosial dengan organisasi lokal seperti asosiasi, klub atau kelompok masyarakat. Pandangan ini mengukur melalui banyaknya organisasi dalam komunitas tertentu. Modal sosial berdasarkan sifatnya adalah “barang” sehingga semakin banyak akan lebih baik dan selalu memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat adalah entitas yang homogen yang secara otomatis menyertakan dan menguntungkan semua anggota (Winarni, 2011).

Modal sosial tidak selamanya menguntungkan tetapi dapat merugikan orang yang bukan kelompok. Misalnya, modal sosial yang terbentuk di kalangan kriminal atau kelompok preman dapat dianggap sebagai modal sosial yang merugikan (*perverse social capital*) yang menghambat pembangunan (Woolcock 2000). Dengan banyaknya kelompok kriminal yang semakin banyak jumlahnya dapat menyebabkan para investor mencari tempat yang lebih baik bagi investasi. Kejahatan

dapat menyebabkan korban jiwa, dapat pula menciptakan situasi yang tidak menentu bagi pengusaha. Dengan kata lain modal sosial negatif menciptakan biaya yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh sehingga para investor menghindari lokasi tersebut.

2. Pandangan Jaringan

Pandangan Jaringan sudah memperhitungkan sisi positif dan sisi negatif modal sosial. Perspektif kedua ini menekankan pada pentingnya asosiasi vertikal dan asosiasi horizontal antar individu serta hubungan inter dan antar organisasi yang saat ini dikenal dengan *bonding* dan *bridging*. Modal sosial tidak selalu berupa manfaat tetapi juga merupakan biaya. Perspektif ini menganggap bahwa masyarakat dapat dicirikan oleh bawaan (*endowment*) mereka akan kedua dimensi modal sosial tersebut. Perbedaan kombinasi antar kedua dimensi akan mempengaruhi hasil yang diperoleh dari modal sosial (Winarni,2011).

3. Pandangan Institusional

Pandangan institusional berpendapat bahwa jaringan kerja, komunitas dan masyarakat merupakan produk dari keadaan politik, hukum dan kelembagaan. Pandangan institusional percaya bahwa kinerja suatu negara atau perusahaan sangat tergantung pada faktor internal seperti, koherensi, kredibilitas, dan kompetensi dan keterbukaan mereka terhadap masyarakat sipil. Pandangan ini memungkinkan pemerintah berperan dalam mendorong terbentuknya jaringan. Kebijakan

kelembagaan dapat memperkuat atau melemahkan jaringan dalam masyarakat. Knack dan Keefer (1997) menyatakan bahwa kepercayaan sesama anggota komunitas, aturan hukum yang jelas, kebebasan masyarakat sipil yang luas, dan kualitas birokrasi yang baik berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Modal sosial dalam masyarakat ikut berperan mengurangi kemiskinan dan memperbaiki tingkat pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Sebaliknya modal sosial yang rendah dapat mendorong masyarakat mundur secara ekonomi. Beberapa penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi rendah terjadi pada masyarakat yang mengalami fragmentasi etnis yang tinggi dan hak politik yang rendah (Woolcock 2000). Dalam kondisi seperti ini inisiatif anggota masyarakat menurun karena ketakutan terhadap sikap anarki kelompok lain. Fragmentasi sosial seperti ini akan berkurang jika *bridging social capital* cukup tinggi.

Lebih lanjut pandangan kelembagaan melihat kelemahan di negara berkembang seperti korupsi, birokrasi yang lamban, pembatasan kebebasan, kesenjangan ekonomi, dan kegagalan penjaminan hak milik menghambat perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kebebasan dan hak politik harus mendapat jaminan dari pemerintah. Pemerintah harus

menjamin agar mereka yang terlibat dalam proses pembangunan tidak diteror oleh mereka yang lebih kuat atau oleh negara itu sendiri.

4. Pandangan Sinergi

Pandangan sinergi merupakan integrasi dari pandangan jaringan dan pandangan institusional. Pembangunan yang inklusif akan tercapai bila terdapat forum bersama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, yang secara bersama mampu mengidentifikasi dan mencapai tujuan bersama. Negara dapat menjadi fasilitator yang baik karena tidak mengenal batas kelas, etnisitas, ras, jender, politik dan agama. Idealnya, negara dapat berdiri di atas kepentingan semua pihak tanpa membedakan kelompok. Walaupun demikian kita tidak bisa menutup mata bahwa pada saat tertentu negara dipengaruhi oleh kelompok tertentu demi kepentingan sesaat. Memang negara berperan menjaga sinergi antar kelompok sosial, namun sebaliknya komunitas dan dunia usaha dapat menciptakan kondisi bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (Woolcock, 2000).

Menurut Evans (1996) ada dua macam prinsip yang mendasari sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil. Prinsip yang pertama adalah prinsip yang saling melengkapi (*complementarity*) dan prinsip mengakar (*embeddedness*). Prinsip saling melengkapi yang dimaksud adalah hubungan yang saling mendukung antara aktor publik dan aktor swasta. Hubungan seperti ini dicantumkan dalam aturan legal dalam rangka melindungi hak asosiasi, misalnya, Himpunan Pengusaha lokal.

Perlindungan hak memungkinkan terjadinya hubungan antara asosiasi komunitas dengan kelompok bisnis. Prinsip mengakar yang dimaksud mencakup sifat dan bentuk hubungan yang menghubungkan masyarakat dengan aparat publik. Misalnya, dalam hal penyuluhan pertanian, pemerintah dapat mengangkat orang lokal menjadi penyuluh yang memberikan penyuluhan di daerahnya daripada menggunakan pegawai dari luar daerah yang jika salah berpotensi memicu konflik. Pegawai lokal secara sosial sudah mengakar sehingga memudahkan komunikasi dengan sesama anggota komunitas.

Rose (1998) menyatakan bahwa institusi publik yang lemah dan perpecahan yang terjadi antar warga dapat menyebabkan ketidakstabilan politik, korupsi yang tinggi, inflasi yang tinggi dan ketimpangan yang tinggi.

2.1.4 Teori Pemberdayaan

Indonesia sebagai sebuah negara berkembang, masih belum mampu untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya sebagaimana warisan dari para *founding fathers* bangsa ini yang termaktud dalam alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Banyaknya kesenjangan antar masyarakat dengan hasil pembangunan semakin memperparah proses penjejahteraan masyarakat. Kemampuan Negara untuk menciptakan ruang kerja baru tidak berjalan lancar sebagaimana diharapkan yang berakibat kepada semakin banyaknya pengangguran-pengangguran khususnya masyarakat pada usia

produktif. Dengan fenomena tersebut, salah satu solusi untuk mengatasi persoalan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan proses pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan secara awam dapat diartikan sebagai proses/kegiatan menggunakan segenap potensi yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia pada suatu masyarakat untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama.

Husen Umar (2010) menyatakan bahwa pemberdayaan berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan) yang menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan, potensi, dan kemampuan yang dimiliki. Dengan demikian agar konsep pemberdayaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat yang diajak untuk mensukseskan program/kegiatan yang diinginkan bersama. Proses pendekatan terhadap masyarakat yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut (Jhingan, 2013) :

1. Mengetahui Karakteristik Masyarakat Setempat (*Getting to know the local community*);
2. Mengumpulkan pengetahuan/informasi terkait masyarakat setempat (*Gathering knowledge about the local community*);
3. Mengidentifikasi pemimpin masyarakat setempat (*Identifying the local leader*);
4. Mencari permasalahan yang muncul pada masyarakat setempat (*Stimulating the community to realize that it has problems*);
5. Mencoba berdiskusi terkait masalah yang sedang dihadapi (*Helping people to discuss their problem*);
6. Memberikan bantuan/solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi (*Helping people to identify their most pressing problems*);
7. Menciptakan kepercayaan (*Fostering self-confidence*);

8. Menetapkan program/kegiatan yang akan dilakukan (*Deciding on a program action*);
9. Memberdayakan sumberdaya masyarakat setempat (*Recognition of strengths and resources*);
10. Kegiatan dilakukan secara berkelanjutan (*Helping people of continue to work on solving their problems*);
11. Peningkatan kapasitas diri sendiri (*Increasing people ability for self-help*).

Dengan melalui tahapan-tahapan pendekatan diatas maka tujuan dari adanya pendekatan yaitu membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri tercapai.

Berdasarkan tahapan diatas maka proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui konsep pemberdayaan dapat ditinjau dari 3 sisi sebagai berikut (Ginanjar, 2010) :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena kalau demikian masyarakat akan punah;
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat
Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kedalam berbagai;
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi
Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengecilkan yang kecil dan dan melunglaikannya yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Tahapan maupun konsep sebagaimana diuraikan diatas tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan partisipasi yang baik dari masyarakat. Oleh karena itu

diperlukan pendekatan-pendekatan dengan berlandaskan pada 4 prinsip sebagai berikut (Sri Najiati, 2005) :

1. Prinsip Kesetaraan

Adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan maupun hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain;

2. Program pemberdayaan

Pemberdayaan dilakukan bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan diikuti oleh masyarakat serta adanya pendampingan yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat;

3. Kemandirian

Menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak melemahkan tingkat keswadayaan;

4. Program pemberdayaan berkelanjutan

Program yang dilaksanakan bukan hanya saat awal saja namun pendampingan dan konsultasi dilakukan sampai pada tahap akhir yaitu adanya kemandirian masyarakat secara ekonomi khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Tahapan terakhir agar proses pemberdayaan kepada masyarakat membuahkan hasil adalah dengan penerapan strategi-strategi pemberdayaan sebagai berikut (Edy Suharto, 2010) :

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konsling, *setress management*, *crisis intervetion*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering

- disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*);
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien). Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya;
 - c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.1.5 Teori Ekonomi Kelembagaan

Salah satu tujuan akhir dari adanya konsep modal sosial melalui pemberdayaan adalah adanya peningkatan ekonomi kelembagaan masyarakat. Disebut ekonomi kelembagaan masyarakat karena tujuan dari dilaksanakannya proses pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang tidak hanya bisa dinikmati segelintir individu masyarakat saja namun dapat dinikmati segenap komponen lapisan masyarakat. Inti dari Ekonomi Kelembagaan adalah memfokuskan diri pada peran proses evolusi dan peran institusi dalam membentuk perilaku ekonomi. Dengan fokus tersebut diharapkan masyarakat tetap bersatu dalam menjalankan visi misi yang telah disepakati untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Tidak adanya keseragaman dari para ahli untuk mendefinisikan ekonomi baik secara individual maupun kelembagaan memunculkan berbagai macam pandangan

namun secara umum ekonomi kelembagaan dapat diartikan sebagai aturan main dalam ekonomi, politik dan interaksi social. Sejarah mencatat teori ekonomi kelembagaan ini lahir pada awal abad 20 di Amerika Utara dengan para tokohnya seperti seperti Thorstein Veblen, Wesley Mitchell, John R. Commons, dan Clarence Ayres yang nantinya aliran ini lebih dikenal sebagai Ilmu Ekonomi Kelembagaan Lama (*old institutional economics*). Seiring berkembangnya waktu muncullah konsep Ekonomi Kelembagaan Baru (*new institutional economics*) mencoba untuk menawarkan ekonomi lengkap dengan teori dan institusinya dimana konsep ini diterapkan/dipelajari sampai hari ini. Erani (2006) menuliskan bahwa ekonomi kelembagaan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi yang lebih spesifik sehingga menghasilkan sebuah solusi perbaikan. Erani (2006) menambahkan dalam upaya penyelesaian terhadap masalah yang dihadapi keberadaan ekonomi kelembagaan juga mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat misalnya sosial, psikologi, hukum dan lain sebagaimana selama konsep-konsep tersebut berkaitan dengan struktur sosial dalam masyarakat.

Oleh karenanya konsep ekonomi kelembagaan merupakan salah satu alternatif dalam program peningkatan kesejahteraan. Sebagaimana diketahui bahwa teori ekonomi neoklasik mengajarkan ekonomi terdiri dari 3 faktor utama yaitu modal, tenaga kerja dan kemajuan/kemampuan teknologi. Dimana faktor-faktor tersebut dapat kita ukur melalui analisis SWOT misalnya banyak pertanyaan kenapa Bangsa Indonesia ini dari dulu tidak bisa maju/berkembang padahal memiliki keunggulan (*strength*) misalnya besarnya potensi sumber daya alam dan manusia yang dimiliki

serta kesempatan (*opportunity*) misalnya dari segi geografis terletak pada persimpangan perdagangan dunia dan berada di *equator state*. Namun kesemuanya itu tidak dapat membantu Indonesia menjadi sebuah negara maju. mengambil pendapat salah satu tokoh *new institutional economics* yaitu Douglass C. North mengatakan bahwa dalam kelembagaan ekonomi diperlukan pembentukan sebuah aturan secara formal misalnya melalui hukum/konstitusi maupun aturan informal melalui norma-norma yang ada dimasyarakat ataupun melalui kesepakatan-kesepakatan.

Dengan demikian selain adanya peran serta dan partisipasi dari masyarakat juga dibutuhkan campur tangan dari Pemerintah yang memiliki peran utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamatkan oleh *founding fathers* yang termaktud dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Ketiga. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan salah satu landasan bagi Pemerintah untuk ikut campur tangan dalam menguatkan potensi ekonomi kelembagaan karena didalamnya terdapat 3 agenda dar 7 agenda pembangunan nasional yang difokuskan pada pembangunan sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya manusia agar berkualitas dan berdaya saing tinggi, pembangunan kebudayaan dan revolusi mental untuk mengikis *mindset* oligarki dan sejenisnya serta perkuatan ipoleksosbudhankam sebagai stabilisator dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan proses transformasi pelayanan publik yang berorientasi pada melayani bukan dilayani. Sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendekatan ekonomi

kelembagaan tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh faktor-faktor lain misalnya faktor politik, faktor sosial dan lain-lainnya dimana faktor-faktor tersebut saling mendukung, mengisi dan mempengaruhi perekonomian.

2.2 Telaah Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan referensi tambahan untuk penulis dalam melakukan penelitian karya tulis ilmiah ini berikut penulis lampirkan telaah penelitian-penelitian yang penulis anggap sejalan dengan konsep dan tema penelitian yang sedang penulis lakukan :

- 1) **Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran (2008)** berjudul “Pemetaan dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Barat” bertujuan mengidentifikasi dan mengukur kondisi modal sosial di Jawa Barat, Menganalisis keterkaitan antara modal sosial dengan penganggulan kemiskinan di Jawa Barat dan merumuskan desain pemanfaatan modal sosial untuk penganggulan kemiskinan Jawa Barat. Analisis data yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah modal sosial yang ada, baik di kalangan masyarakat *rural* maupun *urban* masih dalam tahap *bonding* (sebagai pengikat saja), belum sebagai *bridging* (jembatan) yang menghubungkan seluruh potensi warga.

- 2) **Penelitian yang dilakukan oleh M. Zulham Ulinuha (2011)** dengan judul “Strategi Peningkatan Produktivitas Petani Melalui Penguatan Modal Sosial (Studi Empiris di Kecamatan Guntur Kabupaten Demak) bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial terhadap produktivitas petani dan memformulasikan strategi peningkatan produktivitas petani melalui penguatan modal sosial. Penelitian ini menggunakan metode gabungan/*mixed method* yaitu penggabungan metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kualitatif digunakan kaitannya untuk menjawab pertanyaan peran modal sosial yang ada di masyarakat kecamatan Guntur dalam kaitannya meningkatkan produktivitas petani. Hasil penelitian ini adalah modal sosial yang ada di Kecamatan Guntur dapat terlihat dalam kegiatan Telaga Boga yang sedikit banyak memberikan solusi dari jalan keluar atas permasalahan yang ada.
- 3) **Penelitian yang dilakukan oleh Irma Winarni (2010)** dengan judul “Keterkaitan antara modal sosial dengan produktivitas pada sentra bawang merah di kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung bertujuan untuk mengkaji hubungan antara modal sosial dan produktivitas sebagai ukuran efisiensi pengelolaan usaha tani bawang merah dan menganalisis dimensi atau komponen modal sosial yang penting dalam peningkatan produktivitas usaha tani bawang merah. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif eksploratif kualitatif. Analisis deskriptif akan dapat

lebih mudah mencari tahu karakteristik agribisnis maupun karakteristik modal sosial yang ada di wilayah penelitian.

Sedangkan dengan pendekatan eksploratif akan dianalisis keterkaitan modal sosial dengan produktivitas sebagai proksi daya saing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterkaitan antara modal sosial dengan produktivitas di daerah penelitian relatif lemah. Hal ini disebabkan karena baik di desa yang produktivitasnya rendah (Lamajang) maupun di desa yang produktivitasnya tinggi (Margamulya), keduanya memiliki modal sosial yang rendah walaupun karakteristik modal sosialnya berbeda.

- 4) **Penelitian yang dilakukan oleh Zita Kusuma Ariyanti (2008)** dengan judul “Pengaruh modal sosial terhadap produktivitas tenaga kerja: studi kasus PT. Pagilaran, Batang, Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui variabel modal sosial yaitu partisipasi sosial, dukungan sosial, kepercayaan, pandangan area lokal) dan selain variabel modal sosial yang secara teori berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja yaitu usia, jenis kelamin, dan lama kerja. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel modal sosial dan variabel selain modal sosial yang secara teori berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di PT.Pagilaran dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari tujuh

variabel independen yang digunakan, ternyata tidak semuanya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen berupa produktivitas tenaga kerja.

- 5) **Penelitian yang dilakukan oleh Khabib Bima Setiyawan** dengan judul “ Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat: Studi Kasus di Desa Berjo Ngargoyoso Karanganyar Jawa Tengah. Penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan hutan di desa Berjo, yang terdiri dari tiga lembaga berbeda, yaitu: Taman Hutan Raya (Tahura), Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Penelitian ini dilakukan di desa Berjo, Kota Karangayar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengelolaan hutan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Purposive sampling digunakan untuk memilih responden.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dicapai dengan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non pemerintah. Modal Ikatan Sosial dari keduanya, memungkinkan interaksi dalam berbagi pengetahuan dan sehingga menjadi ikatan antar kelompok. Ikatan sosial yang dimiliki oleh LMDH dan Tahura berada pada tingkat menengah yang berarti mereka mematuhi formal tetapi juga mendekati tingkat nilai, budaya, dan persepsi. Sementara itu, hubungan antara LMDH dan Tahura berada pada tingkat modal sosial yang menganut nilai-nilai formal dalam

menyesuaikan meja kerja mereka yang merupakan konservasi dan produksi hutan. LMDH bekerja sama dengan Perhutani dalam pengelolaan hutan melalui kemitraan. Mereka bekerja sama dalam melindungi hutan dan membuka objek wisata. Sedangkan di penghijauan hutan, Perhutani, LMDH Tahura dan melakukan reboisasi.

- 6) **Penelitian yang dilakukan oleh Rusydan Fathy**, dengan judul “Modal Sosial: onsep, Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat. Modal sosial diasumsikan sebagai alternatif bentuk modalitas lain. Secara teoritis ada perdebatan mengenai modal sosial bermuara kepada relasi-relasi sosial. Perdebatan itu berkenaan dengan konseptualisasi modal sosial sebagai kapital konkrit dimana individu atau kelompok mampu mendayagunakan relasi-relasi sosial mencakup nilai-norma, jaringan sosial dan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial.

Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan modal sosial sebagai konsep teoritis. Pemaparan studi menunjukkan adanya hubungan antara modal sosial dengan inklusivitas dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam konteks pembangunan inklusif berkelanjutan. Artikel ini menyimpulkan bahwa konsep modal sosial berfungsi sebagai kerangka berpikir yang bermanfaat dalam keberhasilan pembangunan dan perumusan kebijakan.

- 7) **Penelitian M.Munandar Sulaeman dan Siti Homzah** dengan judul “Pengembangan (Modifikasi) Teori Modal Sosial Dan Aplikasinya yang

Berbasis Masyarakat Petani Peternak (Studi Kasus Pendekatan Sosiologis Pada Kelompok dan Organisasi Usaha Tani Ternak Sapi Perah di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemungkinan modifikasi dan derajatnya penerapan teori bias atau konsep modal sosial pada petani-peternak berbasis komunitas. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Konsep file substansi yang dikaji sesuai dengan konsep teori modal sosial dan pemahamannya pemrakarsa dan implementasi konsep peninjau sebelumnya tentang modal sosial di petani-peternak.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Konsep modal sosial memiliki dimensi budaya (norma, nilai sikap, keyakinan, kejujuran), struktural (peran dan aturan, jaringan dan interpersonal hubungan; hubungan horizontal dan vertikal) dan dimensi pola relasional (kerja sama dalam memecahkan masalah bersama; saling mengenal, saling mengakui; saling menguntungkan pemahaman; saling simpati). 2) Realitas modal sosial pada kelompok tani (sayuran) degradasi: hilangnya persatuan, kejujuran, kerjasama, jejaring sosial dan simpati timbal balik; Apa yang muncul adalah perilaku individualistis. Kelompok petani masih memiliki modal sosial yang kuat. Pada Organisasi koperasi petani masih berperan sebagai pengelola modal sosial dalam pelayanan sektor. Pada koperasi peternakan sapi perah modal sosialnya cukup kuat. Faktor yang menyebabkan

Adapun kelemahan modal sosial berkaitan dengan kedua faktor eksternal yang terkait dengan pelaku kegiatan bisnis kepentingan pribadi dan faktor internal.

- 8) **Penelitian Nengsih Anen**, dengan Judul “ Peran Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat di Kalurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri” Peran modal sosial yang dimiliki masyarakat mendorong pengelolaan hutan rakyat. Ini Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran modal sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan di Desa Selopuro, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode survey, dimana data Pengumpulan dilakukan melalui teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada responden. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran modal sosial di Desa Selopuro tergolong tinggi. Jadi, peran modal sosial yang kuat akan mendorong pengelolaan hutan yang lebih baik.
- 9) **Penelitian Fauzi Achmad (2015)**, dengan judul “ Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat (Studi Fenomenologi Hutan Rakyat di Kalurahan Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)” Penelitian ini bertujuan untuk merepresentasikan bagaimana bentuk modal sosial masyarakat Selopuro dalam mengelola hutan hak dan praktik penggunaan modal itu dalam sosial kehidupan. Teori yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial dari Pierre Bourdie, yang dalam teori itu, Pierre Bourdie telah membagi jenis sosial modal menjadi empat jenis: modal ekonomi, modal sosial, modal budaya, dan modal simbolis.

Teori ini digunakan untuk mengkategorikan modal sosial di Selopuro ini mengelola hutan hak dan praktik menggunakan modal itu dalam kehidupan sosial. Selanjutnya penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat fenomenologis. Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Seleksi Teknik penelitian ini menggunakan purposive sampling. Apalagi untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Dalam menganalisis data peneliti mengadopsi kerangka kerja dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) untuk menggambarkan fase-fase utama data Analisis: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengelola hutan hak dan sosialnya Kehidupan, modal ekonomi dapat dilihat seperti harta benda, tanah, dll. Dalam pengelolaannya hutan hak, modal ekonomi yang dimiliki seseorang memiliki pengaruh yang kuat di mengelola hutan hak.

Dalam kehidupannya, modal ekonomi dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari seperti

biaya sosial, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Apalagi, hutan hak juga dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai kotak uang. Sosial modal terdiri dari hubungan sosial antar individu, atau hubungan dan jaringan yang berperan sebagai sumber daya dalam mengelola hutan hak. Hutan pribadi juga mampu menjadi media sosialisasi kepada masyarakat. Modal budaya termasuk pengetahuan, cara berbicara, cara bergaul, dan cara melatih diri. Kultural Modal juga berupa pewarisan nilai sikap, pengetahuan, cara kehidupan, dan ajaran agama. Selanjutnya, modal simbolik dapat diturunkan dari a martabat seseorang, status atau gengsi misalnya, posisi seseorang di masyarakat. Selain itu, modal simbolik diperoleh masyarakat dari keturunannya pekerjaan mereka. Modal simbolik dapat digunakan manajer untuk mengakses jaringan dan pengelolaan di hutan hak, kepentingan, dan penentu status dalam masyarakat.

- 10) **Penelitian Ahmad Zikri Fadilah** Judul “ Peran Modal Sosial Dalam Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Hutan Melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)” Hasil kajian Indonesia memiliki hutan terluas ketiga di dunia, akan tetapi kerusakan hutan di Indonesia semakin meningkat karena tidak memiliki pengelolaan yang cukup baik. Disamping itu, adanya kehidupan masyarakat tepian hutan yang hidupnya bergantung pada sumberdaya hutan yang ada. Kehidupan masyarakat tepian hutan memiliki cara tersendiri dalam melakukan pengelolaan hutan

dengan erbasiskan modal sosial. Modal sosial mempunyai peranan sebagai suatu penggerak bagi masyarakat tepian hutan itu sendiri. Dengan adanya modal sosial diharapkan keberhasilan pengelolaan hutan menjadi meningkat.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep pengelolaan kawasan hutan, modal sosial, keberhasilan pengelolaan kawasan hutan dan menganalisis peran modal sosial dalam keberhasilan pengelolaan kawasan hutan. Hasil dari penulisan ini adalah modal sosial dapat menentukan keberhasilan pengelolaan kawasan hutan yang dapat dianalisis melalui efektivitas, yang diukur dengan (a) partisipasi dalam pembuatan perencanaan (b) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan (c) partisipasi dalam pemantauan dan (d) evaluasi partisipasi dalam pemanfaatan hasil.

- 11) Penelitian Putu Susantini (2017),** dengan Judulm “Membuat Modal Sosial Dalam Pengelolaan Hutan” Pengelolaan hutan harus diarahkan pada upaya mencegah erosi dan memlihara fungsi hutan itu sendiri. Pemerintah dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan memiliki tanggung jawab untuk kegiatan tersebut. Untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan, pemerintah disarankan untuk memperkuat modal sosial masyarakat lokal. Modal sosial akan memberikan nilai ekonomis guna memotivasi dan memfasilitasi masyarakat secara individual maupun kelompok untuk memiliki akses pada sumber daya finansial, informasi

dan lain sebagainya. Kondisi ini dapat dilakukan dengan cara pendekatan partisipatif pada masyarakat local sehingga mereka mampu untuk membuat perencanaan, mengambil keputusan dan mengelola sumberdaya local melalui usaha bersama.

- 12) **Artikel Jurnal Khabib Bima Setiawan**, “Social Bonding Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat: Upaya Menuju Masyarakat Hutan Sejahtera. Hutan merupakan sumber penghidupan masyarakat disekitarnya, maka perlu adanya upaya mengelola hutan rakyat tetap agar lestari. Penelitian ini membahas mengenai strategi pengelolaan hutan rakyat di Desa Berjo, dalam pengelolaannya terdapat tiga unsur yaitu Taman Hutan Raya (Tahura), Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengelolaan hutan rakyat. Pemilihan informan menggunakan purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif fungsional dan divaliditas menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan hutan rakyat di Berjo tercapai dengan kolaborasi antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah dengan modal sosial berupa kedekatan (social bonding) yang memungkinkan adanya interaksi dalam membagi pengetahuan sekaligus sebagai perekat hubungan antar kelompok. Social Bonding yang oleh

LMDH dan Tahura tergolong dalam level pertengahan, menganut aturan formal mendekati pada level nilai, kultur, dan persepsi. Sedangkan hubungan antara Perhutani (satuan BUMN) dan Tahura (Satuan Dinas) berada pada level modal sosial yang menganut nilai-nilai formal sesuai tupoksi konservasi dan produksi. LMDH bersama Perhutani melakukan.

- 13) **Penelitian Fauziah (2017)** dengan Judul “Modal Sosial Pada Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono” Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerjasama demi mencapai suatu tujuan bersama didalam suatu kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga unsur modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan dan hubungan timbal balik yang terjalin pada masyarakat desa yang dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai bulan Februari 2017 di Desa Gunung Silanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jenepono. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui observasi dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial didalam masyarakat telah terjalin baik karena tingginya rasa kepedulian diantara kelompok tani dan pemerintah. Masyarakat di desa meyakini bahwa dengan bekerjasama membangun desa akan memberikan manfaat yang baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Tanpa adanya modal sosial yang dianut oleh masyarakat maka kerjasama mereka dengan pihak pemerintah

dalam mengelola hutan kemasyarakatan tidak akan bertahan hingga sekarang.

- 14) Penelitian Endro Sugiartono dan Wenny Dhamayanthi (2016),** dengan Judul “Model Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Desa Hutan Kabupaten Jember” Hasil kajian Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama yang telah merumuskan 3 hasil, yaitu : kondisi modal sosial (social capital), modal manusia (human capital) masyarakat dan modal fisik (physical capital) di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember, tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pemberdayaan di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta sarana yang harus diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember, maka permasalahan penelitian pada tahun kedua ini, mengangkat Model dan strategi pemberdayaan masyarakat seperti apa yang efektif atau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk Menentukan implementasi model dan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Penelitian dilakukan pada masyarakat sekitar kawasan hutan di Kabupaten Jember selama 8 bulan. Hal ini dilakukan karena mengingat

ruang lingkup kajian penelitian yang cukup luas. Metode analisis yang digunakan yaitu Perumusan model dan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan Kabupaten Jember sesuai dengan kondisi dan potensi lokal. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan dari wawancara dengan responden dan nara sumber yang kompeten. Selain itu data juga diperoleh dengan pengamatan dan dokumentasi. Data sekunder berupa studi literatur dan data dari instansi terkait. Output yang diharapkan dalam penelitian ini nantinya akan menjadi masukan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan di Kabupaten Jember.

- 15) Penelitian Frans Bapa Tokan, dengan Judul “ Modal Sosial Kajian Tentang Tata Kelola Pembangunan Masyarakat desa Melalui GEMOHING di Kecamatan Witihama Kabupaten Florest Timur” Fenomena runtuhnya modal sosial masyarakat, seperti tradisi bergotong royong dan berswadaya atau oleh masyarakat desa di Kecamatan Witihama disebut Gemohing kian terasa dalam kehidupan sosial desa, di tengah kuatnya 47 cengkaman modernisasi dan globalisasi. Modal sosial sebagai kekuatan kolektif masyarakat desa yang telah lama berakar dalam kehidupan masyarakat, sejatinya merupakan warisan budaya leluhur dalam mengelola kohesi sosial dan pilar penting pembangunan masyarakat yang mestinya menjadi benteng penjaga peradaban. Karena itu persoalan utama yang hendak dikaji adalah bagaimanakah tradisi

gemohing disorot dari sudut pandang modal sosial dalam mendukung pembangunan masyarakat desa. Kajian ini diharapkan mendeskripsikan secara lebih komprehensif peran kunci yang diemban oleh gemohing sebagai modal sosial dalam mendukung proses pembangunan masyarakat desa.

Hasil kajian membuktikan bahwa modal sosial yang selama ini menjadi kekuatan kolektif bagi tata kelola pembangunan masyarakat desa kian mengalami pergeseran akibat hadirnya lembaga-lembaga sosial baru bentukan Negara dan sejumlah kebijakannya yang justru telah mengabaikan peran utama dari gemohing. Meskipun demikian kekuatan kolektif itu masih dapat dihadirkan kembali mengingat masih dominannya tradisi kultural dan ikatan kekerabatan yang masih melekat dalam kehidupan sosial terutama dalam menghadapi peristiwa sosial budaya maupun kerjasama untuk kepentingan pembangunan masyarakat desa. Dengan demikian disimpulkan bahwa gemohing masih dapat dijadikan sebagai basis penguat energi sosial masyarakat yang bermanfaat bagi pembangunan dan sekaligus penangkal eksese negatif dari globalisasi. Karena itu sejumlah aspek penting dari gemohing sebagai modal sosial seperti kepercayaan, jaringan sosial dan tindakan kolektif masih tetap menjadi kekuatan inti memperlerat dan memperteguh kebersamaan guna menggalang kerjasama yang solid menghadapi berbagai problem dan tantangan pembangunan desa. Itu berarti gemohing harus dijaga dan

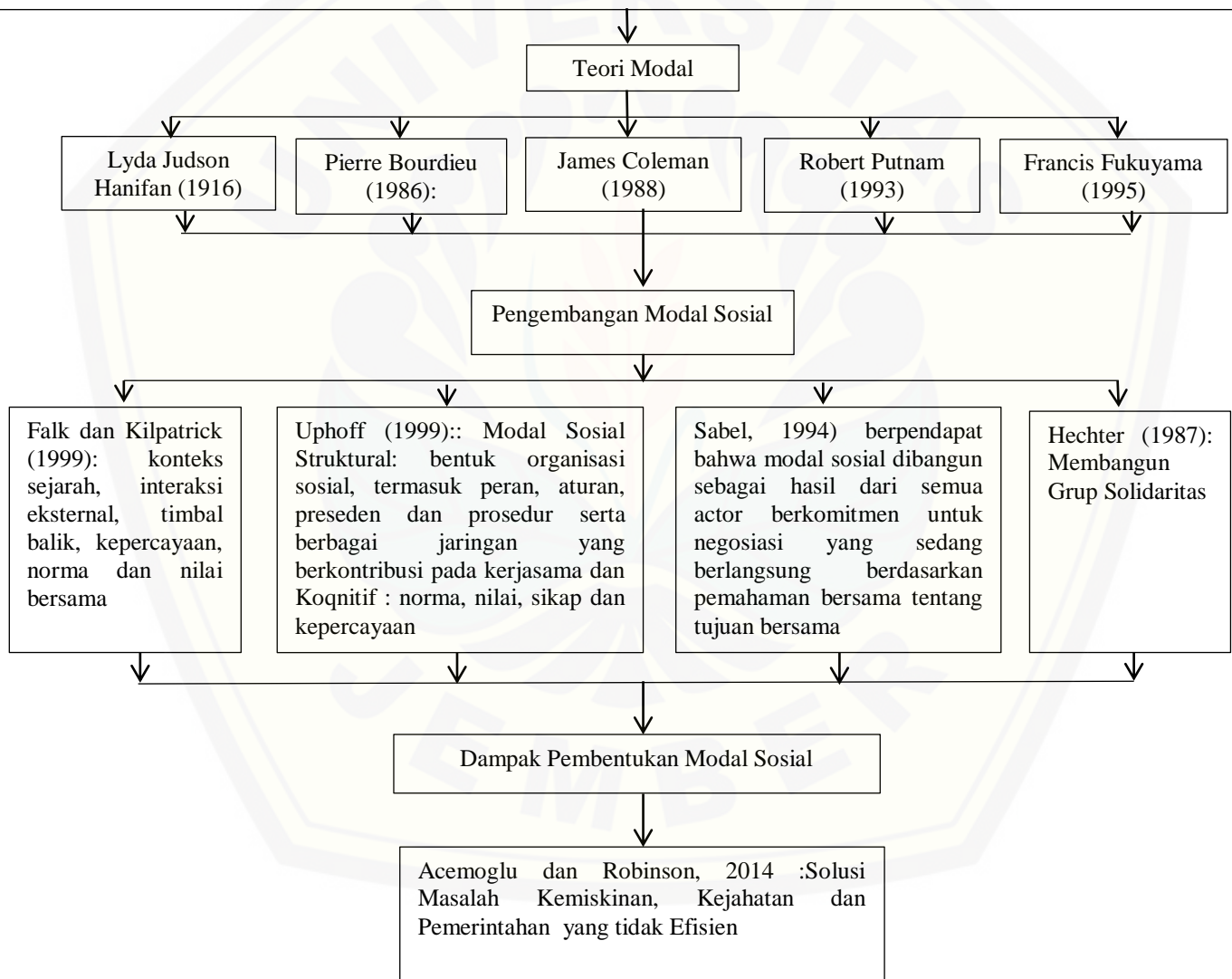
dirawat sebagai kekuatan pengintegrasian masyarakat untuk pembangunan di segala aspeknya. Dan karena itu harus diberi tempat semestinya oleh pemerintah desa dalam seluruh dimensi pembangunan.

- 16) **Mahmud Rizal (2020)**, Pemberdayaan petani kopi melalui konstruksi modal sosial di kawasan pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember; Kesamaan dengan Beberapa penelitian di atas adalah teori Modal Sosial sama, Perbedaannya adalah Pengembangan Modal Sosial dan melihat dampaknya.

2.3 Kerangka Konseptual

Realitas Masyarakat Kawasan Lingkar Mandigu :

1. Tidak adanya sinergitas antara masyarakat dengan pemerintah, instansi terkait maupun lembaga non pemerintah dalam melaksanakan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Sering terjadinya konflik horizontal baik antar masyarakat disekitar wilayah hutan produksi dan hutan lindung tersebut, maupun masyarakat dengan petugas perhutani RPH Mumbulsari yang mengelola hutan dimaksud;
3. Banyaknya buruh migran baik luar maupun dalam negeri sebagai dampak taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah;
4. Dengan rendahnya kesejahteraan menyebabkan banyaknya angka kriminalitas misalnya seperti *illegal logging* dan *illegal minning*;
5. Secara geografis kawasan hutan lindung dan produksi yang dikelola perhutani menjadi gundul dan berpotensi terjadi bencana alam.



BAB III

METODOLOGI PENULISAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini bersifat *action Riseach*, atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dalam penelitian tindakan peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. *Action research* dalam pandangan tradisional adalah suatu kerangka penelitian pemecahan masalah, dimana terjadi kolaborasi antara peneliti dengan *client* dalam mencapai tujuan (Selener Daniel, (1997), sedangkan pendapat Davison, Martinsons & Kock (2004), menyebutkan penelitian tindakan, sebagai sebuah metode penelitian, didirikan atas asumsi bahwa teori dan praktik dapat secara tertutup diintegrasikan dengan pembelajaran dari hasil intervensi yang direncanakan setelah diagnosis yang rinci terhadap konteks masalahnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan menguraikan dan memberikan penjelasan (eksplanasi), memberikan pemahaman yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan mendalam (*in-deph*) tentang fenomena-fenomena sosial yang menjadi objek studi. Penelitian *action research* ini dilakukan melalui kasus, dengan unit kasus yang digunakan adalah desa dengan komunitas petani pengelola hutan Suco dan Lampeji Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember. Pengamatan dilakukan melalui fenomena empirik yaitu dengan

mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari tokoh di dua desa, petani mengenai apa yang dilihat, dirasakan, dilakukan, didefinisikan dan dipahami oleh masyarakat.

Untuk memperdalam pemahaman pada tingkat individu maka digunakan pula studi riwayat hidup (*biographical method*). Tipe studi riwayat hidup yang digunakan adalah riwayat hidup topikal, yaitu riwayat hidup yang mengemukakan suatu tahapan saja dalam kehidupan individu subyek, yang disesuaikan dengan gejala sosial dan konteks yang ingin dipahami.

Dalam karya tulis ilmiah, suatu metodologi penulisan berperan penting dalam membantu pembaca memahai karakteristik dan alur cerita dari karya ilmiah. Husaini Usman (2003) mendefinisikan metode sebagai suatu prosedur/cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis sedangkan metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Metode penelitian yang penulis pilih adalah Metode penelitian kualitatif dengan studi kasus (*case study research*). Penggunaan metode tersebut dikarenakan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam melalui penggalian eksplorasi, menemukan pola-pola, tema-tema, dan merumuskan teori substantif berbasis data lapangan. Penelitian ini diambil karena menelaah fenomena sosial yang berlangsung secara wajar/alamiah bukan dalam kondisi terkendali/laboris.

Robert K. Yin (2009) merumuskan konsep penelitian studi kasus merupakan sebuah metode yang mengacu pada penelitian yang mempunyai unsur bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*) pada pertanyaan utama penelitiannya, objek penelitiannya

bersifat kekinian serta peneliti mempunyai peluang sedikit untuk mengontrol kasus yang ditelitinya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Kawasan Gugusan Pegunungan Mandigu yang meliputi Desa Lampeji dan Desa Suco Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

3.4 Penentuan Informan/Responden

Dalam menentukan responden, penulis menggunakan pola berkembang terus (*snowball*) dengan bertujuan (*purpose*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Pola ini lebih dikenal dengan nama *method purpose*. Responden yang penulis ambil adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi dilingkar kawasan gugusan pegunungan mandigu, Pemerintah Desa Lampeji dan Desa Suco serta Pemerintah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

3.5 Pengumpulan Data

Dalam suatu karya ilmiah berbasis penelitian, terdapat 2 (dua) hal utama yang harus diperhatikan yaitu kualitas instrumen penelitian berupa validitas dan reabilitas instrumen dan pengumpulan data berupa ketepatan penggunaan cara-cara dalam memperoleh/mengumpulkan data (Sugiyono, 2010). Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan teknik/cara pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi :

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan atau pencatatan terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang lokasi penelitian serta mencari data mengenai kebijakan yang telah diambil/ditempuh. Lokasi observasi adalah Kawasan Gugusan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember.

b. Wawancara :

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih akurat berdasarkan fakta dilapangan dengan berbagai narasumber yang dianggap kompeten dengan tujuan penelitian ini. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara mendalam (*indepth interview*) yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2010). Objek *interview* dalam penelitian ini adalah masyarakat lingkaran kawasan gugusan pegunungan mandigu, perangkat Desa Lampeji dan Desa Suco, perangkat Pemerintah Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dan Asper Kehutanan KPH Mumbulsar.

3.6 Analisa Data

Analisis data merupakan metode atau cara menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam penulisan karya tulis ini, penulis menggunakan analisis domain (*Domain Analysis*) yaitu menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik ini digunakan untuk penelitian kualitatif yang bersifat eksplorasi, artinya hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari subjek yang diteliti, tanpa harus dirinci secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan subjek penelitian tersebut toksonomi.

3.7 Validitas Data

Husaini Usman (2010) mengatakan laporan penelitian kualitatif dapat dikatakan ilmiah jika persyaratan validitas, reliabilitas dan objektivitasnya terpenuhi. Penulis menggunakan teknik *triangulasi* yaitu memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya, mendiskusikan dengan teman seprofesi, menganalisis kasus negatif, menggunakan alat bantu dalam mengumpulkan data seperti recorder/kamera, dan menggunakan *member check* (pengecekan kembali data dari responden (Husaini Usman (2010))).

3.7 Kesimpulan

Kesimpulan merupakan pernyataan yang singkat, jelas dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengetesan hipotesis yang diajukan

dalam penelitian. Karya tulis ilmiah ini menggunakan metode induktif yaitu suatu proses berpikir yang mendahulukan adanya persoalan-persoalan khusus melalui fakta-fakta yang konkrit untuk ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan dari proses penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengembangan modal sosial pemberdayaan petani kopi yang dilakukan di Kawasan Pegunungan Mandigu Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember dilakukan melalui melalui :
 - a. Media olahraga paralayang di kawasan pegunungan mandigu menjadi komunitas setempat dan mengkader atlit-atlit paralayanan lokal setempat;
 - b. Pemilihan tokoh informal yang sangat paradok yakni mantan tokoh preman hutan kawasan pegunungan mandigu sebagai pemimpin komunitas;
 - c. Membangun keteladanan yang mempunyai komitmen pada nilai –nilai etika, bisa dipercaya; jujur; pola pikir memberi; saling mendukung,
 - d. Pengembangan budidaya pisang, jeruk lemon secara masal untuk mengamankan pendapatan harian/mingguan (*safety first*) dan
 - e. Pengembangan jaringan hulu hilir komoditas kopi yang berkualitas dan dipercaya dengan branding “cadjoeng coffee” dengan standart operasional pelaksanaan (sop) yang ketat.

2. Dampak pengembangan modal sosial terhadap pengelolaan hutan kawasan pegunungan mandigu antara lain :
 - a. Kesejahteraan pertama yakni pendapatan mingguan dan bulanan terjaga (*safety first*);
 - b. Hutan dikelola secara berkelanjutan dilihat dari aspek lingkungan alam; sosial; dan budaya local; serta aman dari pencurian kayu;
 - c. Berkembangnya budidaya kopi hulu–hilir yang berkualitas dengan perubahan teknologi panen dan paska panen;
 - d. Terbangunnya agroekosistem hutan yang lestari;
 - e. Jaringan tataniga kopi hulu-hilir dengan branding “cadjoeng coffee” yang semakin berkembang;
 - f. Berkembangnya komunitas internasional aktivitas paralayang yang melokal di kawasan mandigu dengan multiplier efek yang besar bagi kesejahteraan petani.

5.2 Saran

Saran/masukan yang dapat penulis berikan dalam hasil penelitian pada karya tulis ilmiah ini (tesis) adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya tokoh sentral yang tidak hanya bisa membimbing melalui konsep-konsep atau teori-teori belaka namun juga mampu/bisa berperan serta memberikan contoh nyata dengan berbaur dan berkorban baik finansial pribadi maupun kebutuhan lainnya sehingga masyarakat di kawasan lingk

mandigu ini memiliki kepercayaan (*trust*) terhadap tokoh sentral ini untuk membuat mereka terbebas dari kemiskinan menuju kehidupan/kesejahteraan yang lebih baik;

2. Untuk terbebas dari belenggu kemiskinan, masyarakat kawasan lingkaran mandigu perlu mendapat pendapatan yang relatif stabil baik per hari, per minggu ataupun per bulannya yaitu dengan cara mengelola potensi sumberdaya yang ada misalnya mengelola potensi daerah dataran tinggi untuk dijadikan kawasan pariwisata parawayang pertama di Jember (untuk jangka panjang), tanam kopi dan sengon (jangka menengah) dan tanam pisang (jangka pendek);
3. Perpaduan konsep modal sosial dengan teori *spiritual love* perlu untuk dimasyarakatkan agar konsep tersebut dapat diterapkan oleh segenap komponen masyarakat kawasan lingkaran mandigu sehingga tidak ada lagi cerita adanya kemiskinan yang mengintai baik bagi masyarakat lingkaran mandigu sendiri maupun masyarakat mumbulsari pada umumnya karena konsep memberi akan menciptakan rasa gotong royong, mempererat tali persaudaraan serta menjauhkan dari perbuatan-perbuatan tercela.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., A. Bebbington, T. Esmail, E. Ostrom, M. Polski, A. Ryan, J.
- Asmin Ferdinal (2018) Kontruksi Modal Sosial Bagi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat : sebuah Kerangka Konseptual, P-ISSN 2303-2898 Vol 7 No 1 April 2018
- Bourdieu, Pierre [1983](1986) “The Forms of Capital”, dalam J.Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Carroll, Thomas F. (2001) “Social Capital, Local Capacity Building, and Poverty Reduction” (Social Development Papers No. 3, Office of Environment and Social Development, Asian Development Bank)
- Coleman, James S. (1988) ‘Social capital in the Creation of Human Capital’ *American Journal of Sociology* 94: S95-S120.
- Coleman, James S. (1990) *Foundations of Social Theory*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Daeng Massiri dkk, (2017), Modal Sosial Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Desa Totai Barat Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong, Proseding Semnas *Biodiversity Conservation*, ISBN: 978-602-6619-69-3
- Davison, Martinsons & kock (2004) *Principles of Canonical Action Research*, Blackwell Publishing Ltd, *Information Systems Journal* 14, 65-86
- Edstrom, Judith (2002) *Indonesia ’s Kecamatan Development Projec: Is It Replicable?* (Social Development Project, The World Bank, Paper No. 39).
- Fukuyama. 1999. *The End of History and The Last Man: Kemenangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Penerbit Qalam

Fukuyama, 1995 *Trust Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Yogyakarta: Qalam

Fukuyama, Francis (1995) *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: The Free Press.

Fukuyama, Francis (2001) "Social Capital and Development: The Coming Agenda". Makalah pada Konferensi "Social Capital and Poverty

Gittel, Ross dan J. Phillip Thompson (2001) " Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development" dalam Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren (eds.) *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation, pp. 115-135

Hanifan, L. J. (1916) "The Rural School Community Center", *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 67: 130-138.

Harris H Kim (2012), Determinants of Individual Trust in Global Institutions: The Role of Social Capital and Transnational Identity, *Sociology Mind* Vol. 2 No. 3, July 13, 2012

Levin, Kurt (1990) *Action Research and Minority Problems The Action Research Reader, 3rd ed.* (Victoria: Deakin University)

Mernissi, Fatema (1997), "Social Capital in Action: The Case of the Ait Iktel Village Association" (<http://poverty.worldbank.org/library/topic/4294/5033>)

Ostrom, Elinor, et al (1994) "Constituting Social Capital and Collective Action" First Published October 1, 1994 Research Article <https://doi.org/10.1177/0951692894006004006>

Article Information Volume: 6 issue: 4, page(s): 527-562 Issue published: October 1, 1994 The University of Michigan Press Manufactured in the United States of America, Printed on acid-free paper (1994)

- Ostrom, Elinor (1996) "Crossing the Great Divide: Coproduction, Synergy, and Development." *World Development*, Vol. 24, No. 6 (June 1996), 1073-87.
- Portes, Alejandro dan Patricia Landolt (1996) "The Downside of Social Capital." *The American Prospect* 26(May-June): 18-21, 94.
- Putnam, R.D. 1993. *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Edward Elgar Publishing Limited: Massachusetts. Schumpeter, Joseph A. *History of Economic Analysis*, New York: Oxford University Press: 1996: New York.
- Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Raffaella Nanetti (1993) *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Putnam, Robert (1993) "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life," *The American Prospect*, 13 (Spring 1993): 35-42.
- Robison, Lindon J., Marcelo E. Siles, dan A. Allan Schmid (2002) "Social Capital and Poverty Reduction: Toward a Mature Paradigm." Department of Agricultural Economics, Michigan State University: Research Report No. 13. (Revisi dari makalah yang disampaikan dalam konperensi "Social Capital and Poverty Reduction in Latin America and the Caribbean", 24-26 September 2001, di Santiago, Chile.
- Sabel 1994 *Learning by Monitoring - The Institutions of Economic Development*. Forthcoming in *Handbook of Economic Sociology*, Neil Smelser and Richard Swedberg, eds, Russell Sage and Princeton University Press Princeton NJ
- Selener Daniel, (1997) *Participatory Action Research and Social Change*, Published by The Cornell Participatory Action Research Network, Cornell University Ithaca, New York, USA.

Download Sabel 1994 Learning by Monitoring - The Institutions of Economic Development.pdf (4.83 MB)

Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren, eds. (2001) *Social Capital and Poor Communities*. New York: Russell Sage Foundation.

Soos, Gabor (2001) "Dimensions of Local Government Performance" (Makalah pada Workshop on "Local Autonomy and Local Democracy : Exploring the Link", Grenoble 6-9 April), Central European University: Tocqueville Research Center.

Sztompka, Pyotr (1999) *Trust: A Sociological Theory*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Van Domelen, W. Wakeman, dan P. Dongier (2001) "Community Driven Development". World Bank Draft for Comments.Reduction In Latin America and The Caribbean: Toward A New Paradigm."Santiago, Chile, September 24-26, 2001.

Uphoff Norman, 2000 "*Understanding Social Capital: Learning from the Analysis and Experience of Participation*; Publisher: World Bank, Editors :Dasgupta P and Serageldin,I

Uphoff Norman, 1999 Understanding social capital: learning from the analysis and experience of participation; Publi Cornell Luniversit.

LAMPIRAN- LAMPIRAN (FOTO DOKUMENTASI)



Manajemen media sebagai sarana promosi brand *coffee cadoeng*



Sosialisasi program pemberdayaan kepada masyarakat lingkaran mandigu



Patron lokal Pak Antok (kanan)



Pemberdayaan masyarakat lingkaran mandigu dalam proses panen petik merah



Pengurusan izin usaha dan pengembangan diri melalui pelatihan-pelatihan